

# Sahabat Keluarga



## CEGAH LAHIRNYA BAYI *STUNTING* BARU

Kepala BKKBN Berharap Pembangunan  
Manusia dan Bonus Demografi  
Masuk Visi dan Misi Capres-Cawapres

Kepala BKKBN Dorong  
Daerah Lakukan Audit  
Kasus *Stunting*



## PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN MELALUI ELSIMIL pada Oktober 2023 tercatat:

Catin yang terdaftar  
di Simkah

**117.114**  
Orang

Catin Teregister

**49.113**

Catin TPK: 45.291  
Catin Mandiri: 3.822

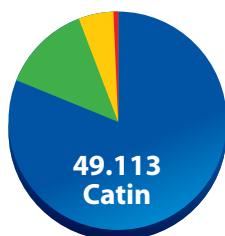
**Pendampingan Catin oleh  
Tenaga Pendamping Keluarga  
pada Oktober 2023:**

- Layanan pemberian TTD dimana Catin mendapat TTD sebanyak 33.592 (68,5%), sisanya 15.469 (31,5%) Catin tidak mendapat TTD.
- Layanan penyuluhan/ KIE dimana Catin yang mendapat penyuluhan (perorangan dan kelompok) sebanyak 45.425 dan yang tidak memperoleh penyuluhan sebanyak 7.324 Catin.

Persentase data Elsimil dengan Simkah **41,9%**

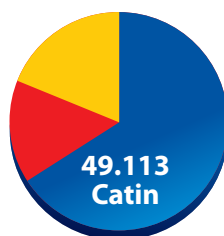
### Skrining Kesehatan & Cegah Anak Stunting Secara Dini

Usia Catin



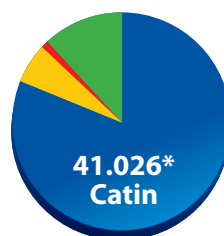
■ 80.6%; 20 - 34 Tahun  
■ 13.3%; <20 Tahun  
■ 5.3%; 35 - 39 Tahun  
■ 0.8%; >39 Tahun

Indeks Massa Tubuh



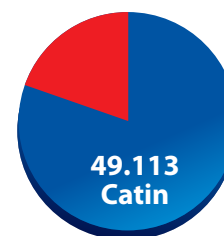
■ 65.5%; Normal  
■ 20.5%; Berlebih  
■ 14.0%; Kurus

Pemeriksaan HB\*



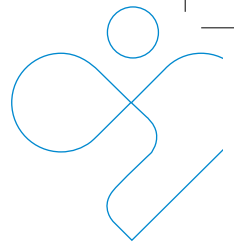
■ 64.6%; Normal  
■ 13.5%; Anemia Ringan  
■ 5.3%; Anemia Sedang  
■ 0.3%; Anemia Berat

Hasil Ukur LILA



■ 78.4%; Normal  
■ 21.6%; KEK

\*Dari 49.133 terdapat 8,107 (16,5%) belum melakukan pemeriksaan HB



**EDITORIAL**

Pintu Masuk Itu Program KB \_\_\_\_\_ 1

**JENDELA**

Kepala BKKBN Berharap Pembangunan Manusia dan Bonus Demografi Masuk Visi dan Misi Capres-Cawapres \_\_\_\_\_ 2

**LAPORAN UTAMA**

Kepala BKKBN: Manfaatkan Bonus Demografi Agar Tidak Masuk Jebakan Pendapatan Menengah \_\_\_\_\_ 4

Ancam Bonus Demografi, Pendapatan Orang *Stunting* Lebih Rendah 20 % \_\_\_\_\_ 6

Kepala BKKBN: Penyebab Banyaknya Perceraian Karena *Toxic People* \_\_\_\_\_ 8

Pesan Kepala BKKBN pada Dokter Kandungan: Tolong Bantu Cegah Lahirnya Bayi *Stunting* Baru \_\_\_\_\_ 10

Kepala BKKBN Optimistis Penurunan *Stunting* Capai Target 14 Persen pada 2024 \_\_\_\_\_ 12

Kepala BKKBN Dorong Daerah Lakukan Audit Kasus *Stunting* \_\_\_\_\_ 13

Tim Pendamping Keluarga Kunci Percepat Turunkan *Stunting* \_\_\_\_\_ 14

**LAPORAN KHUSUS**

Wabup Sumbawa Barat Sebut *Stunting* Akibat Asupan Makanan Cepat Saji \_\_\_\_\_ 16

Kepala BKKBN Paparkan Strategi Turunkan *Stunting* kepada Lurah dan Kades \_\_\_\_\_ 17

Kolaborasi Pekan Pelayanan KB Raih 1,6 Juta Akseptor, BKKBN Beri Penghargaan TNI AD \_\_\_\_\_ 18

**STUNTING**

Tim Terpadu 19 Kementerian Observasi Posyandu dan Keluarga Berisiko *Stunting* \_\_\_\_\_ 20

BKKBN Evaluasi Program Penurunan *Stunting* di Wilayah Perbatasan, Pesisir dan Rawan Pangan \_\_\_\_\_ 21

Perkuat Pendampingan Calon Pengantin dan Keluarga Berisiko *Stunting* di Regional Timur Indonesia \_\_\_\_\_ 22

Menikah Muda Berpotensi Lahirkan Anak *Stunting* \_\_\_\_\_ 24

Entaskan *Stunting* di Riau, BKKBN *Launching* Si Peti Keris \_\_\_\_\_ 25

Terjadi Akibat Faktor Multi Dimensi Jatim Perlu Usaha Keras Capai Target 14% \_\_\_\_\_ 26

**TNI & STUNTING**

TNI, *Stunting* dan Keluarga Berencana \_\_\_\_\_ 27

BKKBN: Hanya Tinggal 10 Bulan untuk Kejar Target *Stunting* 14 Persen \_\_\_\_\_ 28

**KEPENDUDUKAN**

Konferensi Internasional PPD di Zimbabwe Soroti Tiga Isu Utama Kependudukan Dunia \_\_\_\_\_ 30

**KB & KESPRO**

BKKBN - RS Akademik UGM Jalin Kerja Sama Teknis Medis Pelayanan Kontrasepsi \_\_\_\_\_ 32

**KEMITRAAN**

Refleksi 88 Tahun GPM Kolaborasi Bersama BKKBN dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Maluku \_\_\_\_\_ 34

Dorong Warga Punya Lebih Banyak Anak Negeri Pahang Pelajari Program Bangga Kencana di DIY \_\_\_\_\_ 36

**SOSOK**

Pulau Talibu, Zahra Yolanda dan *Stunting* \_\_\_\_\_ 38

Lincih di Usia 78 Tahun, Sukamto Tak Lelah Kampanyekan Pencegahan *Stunting* \_\_\_\_\_ 40

**INFO**

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di BKKBN Wajib Punya *Mindset* Jujur dan Sederhana \_\_\_\_\_ 42

Delapan Pakar Dihadirkan BKKBN Kembangkan Strategi Komunikasi Percepatan Penurunan *Stunting* \_\_\_\_\_ 44

**KIPRAH**

Prevalensi *Stunting* Naik 4,9 Persen, Komisi IX DPR-RI Kunjungi Majene \_\_\_\_\_ 46

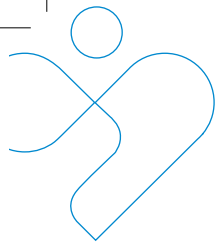
**TEKA TEKI SILANG** \_\_\_\_\_ 47

**DAERAH**

Sri Sultan HB X Berharap Penurunan *Stunting* di DIY Lampau Target Nasional \_\_\_\_\_ 48

**dr HASTO MENJAWAB** \_\_\_\_\_ 50

**PERSPEKTIF** \_\_\_\_\_ 51



REDAKSI

# Sahabat Keluarga



#### Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id  
mediacenterbkkbn@gmail.com  
Telp. 0812-3888-8840  
Jl. Permata nomor 1  
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Redaksi menerima tulisan terkait isu Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga serta *Stunting*.  
Kirim ke alamat/kantor redaksi atau email redaksi.

#### Pelindung

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  
Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)

#### Pengarah

Sekretaris Utama  
Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi  
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd

#### Penanggungjawab

Plt. Direktur Komunikasi, Informasi, Edukasi  
Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si

Kepala Biro Umum dan Humas  
dr. Victor Palimbong

#### Redaktur

Ade Anwar  
Muktiani Asrie Suryaningrum  
Fimela Apriany  
Annisa Halimatusyadiah  
Bramanda Garibaldi  
Ronny A.P. Situmorang

#### Penyunting

Kristianto  
Santjojo Rahardjo  
Emah Salomi Suebu  
Duly Apika Sari  
M. Azis Antony

#### Desain Grafis

Antonius Angkawijaya  
Subhan

#### Sekretariat

Teddi Hadian Ruswandi  
Nina Tri Rahmiyanti  
Rika Utari

#### Pembuat Artikel

Rizky Fauzia  
Fatimah  
Tri Wulandari Henny Astuti  
Fitri Aminatul Azizah  
M. Azis Antony  
Aulia FDA  
Andi Munandar Anwar  
Tresnawati  
Devi  
IG Rukmana  
Krisna Soselisa  
FX Danarto SY  
Kristianto  
Santjojo Rahardjo  
Martin

#### Fotografer

Muhammad Rinualdy  
Vivaldi Maulana Zhafran  
Samidi



bkkbnofficial



@BKKBNOfficial



@BKKBNOfficial



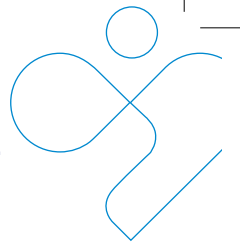
BKKBNOfficial



BKKBNOfficial



<http://www.bkkbn.go.id>



## PINTU MASUK ITU PROGRAM KB

Hari Kontrasepsi Sedunia atau *World Contraception Day* baru saja berlalu. Hari itu diperingati di setiap tanggal 16 September. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ikut memperingatinya pada 26 September 2023 lalu.

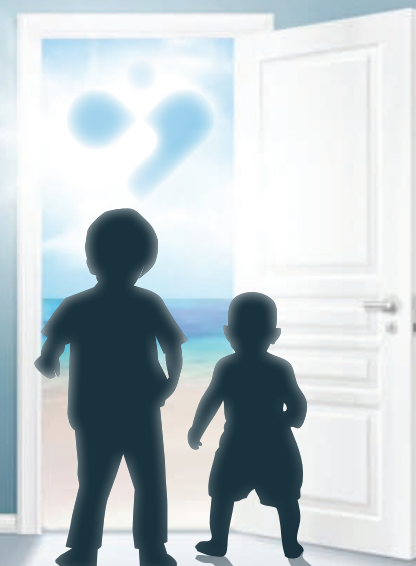
Mengambil lokasi Kota Cimahi di Jawa Barat, ratusan tamu undangan memadati lapangan Rajawali. Di antaranya dihadiri Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader KB dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB), hingga mitra kerja BKKBN.

Menyambut peringatan tersebut, sebelumnya BKKBN menggelar Pekan Pelayanan KB. Hasilnya di atas target. Di belakang kegiatan ini ada TNI-AD. Akseptor KB berbondong-bondong menyemut di banyak titik pelayanan KB yang digelar di pusat-pusat fasilitas pelayanan kesehatan milik TNI-AD yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Bisa jadi, inilah untuk kali pertama TNI ambil bagian yang cukup signifikan dalam pelayanan KB di seluruh negeri, meski sesungguhnya program KB – ditandai dengan dibentuknya lembaga BKKBN – sudah diluncurkan pemerintah secara resmi pada awal 1970.

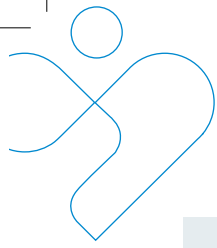
Tentu saja gelar pelayanan KB kali ini, dengan target hampir 1,5 juta akseptor – namun terealisasi hingga 1,6 juta akseptor, bukan semata untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Lebih dari itu adalah sebuah layanan dalam upaya anak negeri ini “membasmi” bahaya laten *stunting*.

Apa kaitannya KB dengan *stunting*? Tentu ada. Jumlah anak yang “terkendali” dalam keluarga, pengaturan jarak kelahiran 3 - 5 tahun, pola asuh anak yang tepat, itu semua meniadakan ibu melahirkan anak *stunting*.



Sesungguhnya, BKKBN hadir dalam tugas mulia pencegahan *stunting* lebih ditujukan untuk melakukan perubahan perilaku di tengah masyarakat. Perubahan akan munculnya pemahaman baru bahwa *stunting* telah mengancam masa depan bangsa dalam menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Karena itu, pola asuh terhadap anak dan perempuan harus diubah.

Maka, adalah tepat, bersama BKKBN, kini kian banyak elemen masyarakat dan instansi pemerintah semakin bergotong royong melakukan penanggulangan dan pencegahan *stunting* menuju ‘*new zero stunting*’. Dan program KB menjadi salah satu pintu masuk. ■



# Kepala BKKBN Berharap Pembangunan Manusia dan Bonus Demografi Masuk Visi dan Misi Capres-Cawapres

■ Penulis: Rizky Fauzia

**JAKARTA, BKKBN** – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) berharap calon presiden dan calon wakil presiden memasukkan pembangunan manusia dan Bonus Demografi dalam visi dan misinya.

“Jadi saya berharap betul kepada para capres dan cawapres jangan hanya menjanjikan bantuan sosial saja. Jangan hanya yang sifatnya *charity*. Menurut saya investasi dalam kualitas (manusia) ini penting sekali,” ujar dokter Hasto saat menyampaikan orasi ilmiah pada Wisuda Universitas Respati Indonesia (Urindo) Tahun Akademik 2022 - 2023 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (26/10/2024).

Dokter Hasto menegaskan agar jangan hanya terjebak kepada pembangunan SDM secara *physically*. Melihat hal-hal yang sifatnya ideologis dan substansional, ini belum tentu *related* dengan yang elektoral. Karena rakyat masih banyak yang belum paham masalah ideologi dan masalah substansional. “Rakyat hanya paham program-program *charity*. Siapa lagi yang bisa memperjuangkan hal-hal yang sifatnya ideologi dan substansional. Kalau menurut saya fokus kepada pembangunan keluarga ini menjadi sangat penting. Fokusnya kepada bangunlah badannya, bangunnya jiwanya, tetapi dengan rumahnya adalah di dalam keluarga,” kata dokter Hasto.

Orasi ilmiah itu mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Penduduk Indonesia Menuju Indonesia Emas”.

Dokter Hasto mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat harus memprioritaskan pembangunan manusia. “Dalam arti bagaimana yang mental *disorder* ini kurang sehat, *stress*, depresi, *anxietas* hidupnya. Tidak ada yang mengusulkan kepada bupati bikin bangsal jiwa, psikolog dan dokter jiwanya ditambah. Sifatnya (aspirasi masyarakat) biasanya hubungan

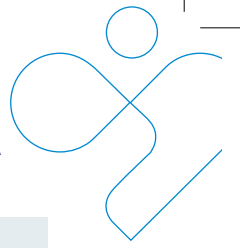
elektoral karena menguntungkan,” kata dokter Hasto.

“Karena itu menurut saya sekarang ini sudah waktunya berubah dalam menyikapi bonus demografi. Saya berharap hal seperti ini masuk ke dalam visi misinya presiden. Kalau menurut saya visi misi pembangunan manusia itu sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Itu periode pertama revolusi mental,” kata dokter Hasto.

Menurut dokter Hasto jika *stunting*nya di bawah 8 persen pendapatan perkapita bisa 22 persen lebih tinggi dari pada sekarang. “Hal itu keren. Itulah pembangunan manusia. Strategi berikutnya adalah mencerdaskan. Nah kritik saya, kita ini hanya terpaku kepada *physically*. *Stunting* itu kan fisik juga, otak itu juga masuk fisik. Tapi ada fungsi otaknya cerdas, tapi mental *emotional disorder* itu jangan diabaikan. Banyak juga orang tidak *stunting* tapi eror. Itu juga akan bermanfaat,” ujar dia.



Rakyat hanya paham program-program *charity*. Siapa lagi yang bisa memperjuangkan hal-hal yang sifatnya ideologi dan substansional. Kalau menurut saya fokus kepada pembangunan keluarga ini menjadi sangat penting.



Selanjutnya dokter Hasto mengatakan kunci membangun keluarga itu ada di rencana awal berumah tangga. “Membangun keluarga itu kuncinya. Jangan *prewedding* aja tapi pre konsepsi. Keluarga tangguh lansia tangguh *resillience*. Kalau kita keluarga yang berkualitas itu yang mandiri, tenteram, bahagia. Kalau saya masih belum bisa gembira ya karena lansia sekarang mayoritas ekonominya menengah ke bawah dan lansia sekarang mayoritas tidak punya tabungan, sedikitlah yang punya, 10 persen lah,” kata dia.

“Saya sering membagi lansia menjadi 4 kuadran, yang sehat dan punya tabungan, hebat itu keren. Kemudian yang sehat tapi nggak punya tabungan, yah lumayan masih bisa disuruh-suruh kerja sedikit. Kemudian punya tabungan tapi tidak sehat, masih bisa investasi. Tapi yang kuadran ke empat tidak sehat dan tidak punya tabungan. Maka sebetulnya *manage* orang lemah itu salah satu yang menentukan suksesnya bangsa dan negara. Karena kalau yang lemah sudah *manage* yang empat kan tidak perlu *manage* sudah hebat. Itulah satu catatan penting untuk Respati, ini bagus,” tegas dokter Hasto.

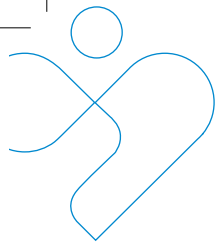
Ia juga mengatakan bahwa di era disrupsi ini keluarga telah kehilangan modalitas. “Sebagai unit terkecil di masyarakat, keluarga merupakan sekolah pertama, pendidikan pertama adalah di keluarga. Nenek moyang kita meneladani asah asih asuh sudah *clear*. Memang transformasi dalam menyikapi era disrupsi ini membuat gagap keluarga kita.”

“Orang tua dulu bisa ajak makan di meja makan, kasih teladan dan nasehat. Orang tua sekarang kehabisan modalitas dan cara, karena mereka (anak-anaknya) sekarang di kamarnya sendiri dengan *gadgetnya*. Komunikasi jarang terjadi di meja makan, ketemu dengan bapak ibunya juga jarang. Jadi modalitas komunikasi itu belum ditemukan di era baru ini. Sehingga orang tua pun suka kehabisan kosa kata untuk bicara dengan anaknya. Ini kan berbahaya. Nah itulah menurut saya pendidikan keluarga itu penting,” ujar dokter Hasto.

Editor: Kristianto

Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)





## Kepala BKKBN: Manfaatkan Bonus Demografi Agar Tidak Masuk Jebakan Pendapatan Menengah

■ Penulis: Rizky Fauzia

**JAKARTA, BKKBN** – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menyatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan dengan baik Bonus Demografi agar tidak masuk dalam jebakan Pendapatan Menengah (*middle income trap*) menjelang Indonesia Emas 2045.

“Hari ini setiap 100 orang bekerja hanya menanggung 44. Jadi kalau mau kaya adalah sekarang di era Bonus Demografi ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi dan kalau tidak oleh generasi muda ini oleh siapa lagi. Kita lihat di sini bahwa tahun 2035 sudah akan lewat *windows opportunity* Bonus Demografi karena *dependency ratio* sudah naik. Sehingga kalau kita terjebak di *middle* dan



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)

*low income trap* ini maka susah keluar dari jebakan itu. Karena perbandingan yang bekerja dengan yang butuh makan sudah mulai berat,” kata dokter Hasto saat menyampaikan orasi ilmiah pada Wisuda Universitas Respati Indonesia (Urindo) Tahun Akademik 2022 - 2023 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Orasi ilmiah itu mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Penduduk Indonesia Menuju Indonesia Emas”.

“Hati-hati, sebelum Indonesia Emas kita di tahun 2035 itu harus sukses, kalau tidak sukses, berat. Jadi kita harus memanfaatkan *windows opportunity* ini. Generasi muda menjadi penentu kita akan memetik Bonus Demografi atau tidak. Generasi muda harus tidak kawin pada usia dini, harus tidak putus sekolah, harus tidak nganggur, harus tidak sebentar-sebentar hamil,” kata dokter Hasto.

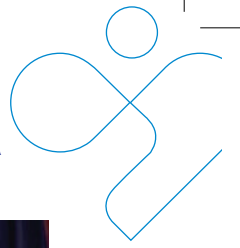
Dalam orasi itu, dokter Hasto juga menyampaikan apresiasi kepada Urindo yang telah ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM dan keluarga. Salah satunya dengan dibentuknya Sekolah Lansia.

“Bonus penduduk menjadi bonus kesejahteraan. Tentu butuh upaya di antaranya adalah peningkatan layanan pendidikan dan juga pelayanan kesehatan itu menjadi prioritas penting menurunkan angka *stunting*, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga menjadi angka utama. Jangan lupa yang diprioritaskan di sini sungguh luar biasa yaitu program untuk ramah lansia dan ini yang menjadi kerja sama baik diantara Respati dan BKKBN kita terus menguatkan kerja sama untuk mengurus lansia,” lanjut dokter Hasto dalam paparannya.

Menurut dokter Hasto, kualitas sumber daya manusia itu ditentukan oleh tiga hal seperti bagaimana pendapatan per kapitanya, bagaimana angka harapan hidupnya, dan kemudian juga bagaimana pendidikannya. Rata-rata Pendidikan untuk rata-rata lama sekolah masih 8,48 tahun meskipun harapan lama sekolahnya harusnya sudah 12 tahun. Hal ini menjadi satu hal serius dan ia berharap bisa sama-sama diperjuangkan agar indeks pembangunan manusia meningkat.

Kesenjangan daerah masih terlalu tinggi antara satu daerah dengan daerah yang lain, sebagai contoh IPM Yogyakarta 79, Bali 75, namun ternyata IPM Papua 60,44





Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) hadir dalam Wisuda Universitas Respati Indonesia (Urindo) Tahun Akademik 2022 - 2023 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

dan seterusnya. Pengaruh dari *stunting* itu sangat serius karena human capital indeks Indonesia yang sangat erat dengan *intellectual skill* manusia dan ini menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas SDM satu bangsa, dengan *stunting* di atasi maka kualitas SDM juga bisa diatasi dengan baik.

#### Menjadi Wirausahawan

Sementara itu Rektor Universitas Respati Indonesia Prof. Dr. drg. Tri Budi Wahyuni Rahardjo, MS dalam sambutannya menyebutkan bahwa para wisudawan dan wisudawati sebagai kelompok usia produktif harus bisa menjadi wirausahawan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memaksimalkan bonus demografi meraih Indonesia Emas 2045.

“Visi Urindo adalah universitas *entrepreneur* yang ramah lansia yang diakui secara internasional. Ini berarti bahwa sebelum teman-teman ini wisuda sekitar 30 persen sudah menjadi praktisi wirausahawan. Jadi sekarang paradigma bukan hanya mencari kerja tapi sudah menciptakan lapangan pekerjaan, dan ini menjadi tantangan untuk wisuda yang lain,” kata dia.

“Kita semua diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam pengembangan GoLantang. dokter Susiana, adalah direktur sivas kedua, beliau adalah yang selalu bersama BKKBN mengembangkan program GoLantang. Kita bersyukur sekali sebagai universitas ramah lansia maka

Bapak Kepala BKKBN berkenan mendukung kita semua untuk menerbitkan buku gerontologi. Ini adalah buku ajar pertama di Indonesia. Dan kita juga bersyukur akhirnya yang terus akan kita kembangkan adalah sekolah lansia. Untuk itu kami mohon dokter Tri Suratmi sebagai Kepala Sekolah Lansia yang terus mengembangkan *prototype* sekolah lansia dan dikembangkan di BKL (Bina Keluarga Lansia),” tambah Prof. Tri.

Sejalan dengan itu, Kepala LLDikti Wilayah III Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc yang juga hadir memberikan sambutannya mengatakan semangat berwirausaha adalah bagian penting membangun Indonesia sejahtera.

“Dalam rangka menyambut bonus demografi 2030 mendorong *spirit entrepreneurship* untuk para lulusan sarjana tentu menjadi bagian penting untuk membangun indonesia sejahtera. Indonesia merupakan negara yang besar dan majemuk, disamping itu negara ini juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan melalui berbagai usaha untuk mengisi pasar kerja. Pengembangan *entrepreneurship* yang dilakukan maksimal dapat meningkatkan keberhasilan dalam melewati tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa ini. Dalam konteks ekonomi *spirit entrepreneurship* menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi,” imbuh Prof. Toni.

Editor: Kristianto



Acara Peluncuran Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) dan Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2023

## Ancam Bonus Demografi, Pendapatan Orang *Stunting* Lebih Rendah 20 %

■ Penulis: Fatimah

**JAKARTA, BKKBN** – Orang *stunting* bakal berpenghasilan lebih rendah dibanding orang normal. Berdasarkan kajian, orang *stunting* pendapatan hanya 20 persen di masa akan datang.

“Sebetulnya muara indikatornya adalah *stunting*. *Human capital index* proporsi terbesarnya *stunting*, ya memang ada *human development index* tapi *human capital index* lebih presisi untuk menduga. Sehingga kelompok manusia *stunting* dan tidak *stunting* selisih pendapatannya 20 persen,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dalam peluncuran Sistem Informasi Peringatan Dini dan Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) di Auditorium BKKBN, Kamis (19/10/2023).

Dokter Hasto mengatakan ada satu kajian yang lebih dalam bagi satu daerah yang sudah mencapai bonus demografi berarti naik akselerasi pendapatan per kapitanya. “Kajian ini *serious problem* dan kajian ini menarik sekali. Jadi kita harus *equal equity*, itu dari sisi kuantitas dan kita sudah menemukan masalahnya,” kata dokter Hasto.

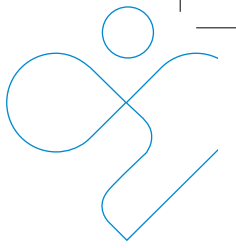
Sekarang, kependudukan juga terkait dengan kualitas penduduk, yang ditekankan sekarang isu-isunya itu keseimbangan antara kualitas dan kuantitas. “Kualitas itu ada *stunting*, kualitas yang sangat sarat dengan kuantitas secara individu, kalau tadi kuantitas secara populasi, *stunting* dari tinggi badannya, berat badan, ini kualitas yang sangat dekat dengan kuantitas secara individu,” ujar dokter Hasto.

Menurut dokter Hasto, *Aging Population* yang meningkat berkaitan erat dengan *sandwich generation*. Tahun 2035, Generasi *Sandwich* yang harus menanggung orang tuanya. Menurut UN ESCAP (*Economic and Social Commission for Asia Pacific*) 2023, *aging population* 2022 di Indonesia sebesar 277,534. Dokter Hasto mengatakan indeks pembangunan manusia akan tergeser, maka rata-rata ekonominya rendah. “Kalau generasi sekarang lincah gerak dan tinggi badannya maka akan menjadi generasi yang hebat di masa depan,” jelas dokter Hasto.

Dalam acara yang sama diadakan juga penandatanganan MoU BKKBN dengan Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI). Generasi hebat sasaran utamanya adalah remaja. “Remaja menjadi populasi strategis sasaran, kalau kita mau merubah kualitas kuantitas itu siapa yang akan hamil, siapa yang akan menikah, siapa yang akan jadi pasangan hidup baru ya remaja, yang berada di bangku sekolah, di bangku kuliah pun sudah telat, sudah banyak yang kawin dibangku kuliah bahkan banyak yang tidak kuliah, tapi kalau di SMA, SMP ini semua tertangkap, kalau diperguruan tinggi ya kita tangkapnya hanya yang bisa kuliah sehingga madrasah menjadi penting,” kata dokter Hasto.

Pada tahun 2022, terdapat sekitar 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat (24,00 persen) penduduk Indonesia berada di kelompok umur antara 16 - 30 tahun atau disebut sebagai pemuda.

Editor: Kristianto



# Satukan Data dalam Satu Aplikasi InZting, Ikhtiar Sulawesi Selatan Atasi *Stunting*

■ Penulis: Rizky Fauzia

**MAKASSAR, BKKBN** – Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) mengukuhkan Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Bapak dan Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS), Selasa malam (03/10/2023), di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Pada acara tersebut juga diluncurkan aplikasi InZting (Ikhtiar Men-Zero-kan *Stunting*).

“Memang ini (aplikasi InZting) dari hulu sampai hilir mulai dari remaja, mau nikah, hamil kemudian setelah melahirkan. Jadi, setelah melahirkan, Balita dan Baduta tercover semuanya di dalam aplikasi namanya InZting ikhtiar menzerokan *stunting*. Saya apresiasi. Menyangkut dari hulu hingga ke hilir, empat hal itulah yang menjadi sasaran utama *stunting*,” jelas dokter Hasto saat ditemui wartawan se usai acara.

Ia juga mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan lima pilar dalam target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. “Yang diberikan kepada para gubernur ada lima pilar. Pertama, komitmen, kemudian sosialisasi KIE. Ketiga, konvergensi. Keempat, penyediaan pangan dan terakhir data. Hari ini saya lihat komitmen Pak Gubernur luar biasa, jadi BAAS, kemudian KIE juga bagiannya, konvergensi, semua energi dana desa diarahkan ke sana, saya titip Program Keluarga Harapan (PKH), anggaran dari pusat diarahkan untuk *stunting* sehingga kalau tidak belanja untuk *stunting* berarti tidak tepat sasaran. Keempat, gubernur tadi ke Bulog, jadi ketersediaan pangan di jamin. Kelima, data hari ini di *launching* berkomitmen untuk satu data. Saya kira lima pilar ini sudah dilaksanakan,” papar dokter Hasto.

Dokter Hasto juga mengingatkan bahwa Bonus Demografi tinggal 13 tahun lagi karena pada tahun 2035 *windows of opportunity* sudah *close*, *dependency ratio* sudah naik, orang-orang tua sudah banyak sehingga *aging population* sudah terjadi. “2045 *aging population* yang mana pendidikan orang tua di 2035 adalah 8,3 tahun, rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Jadi kalau generasi yang di bawahnya ini *stunting*, waduh berat sekali,” ujar dokter Hasto.

“Jangan sampai kita ‘*growing old before growing rich*’. Suatu wilayah sudah melimpah orang tuanya tetapi tidak atau belum naik signifikan pendapat perkapitanya. Menjadi sulit karena bebannya terlalu berat. Jadi, kalo kaya ya sekarang, kalo nggak ya kapan lagi,” jelas dokter Hasto.

Terkait peluncuran aplikasi InZting, Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditemui usai acara mengatakan bahwa harus ada satu data agar penanganan



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) saat jumpa pers usai pengukuhan Pj. Gubernur dan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Bapak dan Bunda Asuh Anak *Stunting*.

*stunting* bisa tepat sasaran, merata dan tidak dobel.

“Saya sejak awal dulu ada satu data. Karena bagaimana supaya uang yang terbatas itu bisa terkonsolidasi, maka harus berangkat dari satu data. Satu data oleh seluruh instansi kabupaten-kota sama semua. Ini basis datanya sama dan diintegrasikan di tingkat provinsi. Nanti satu pintu untuk dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan BKKBN RI. Kemudian, ada juga data dari BKKBN yang bisa kita koneksikan,” jelasnya.

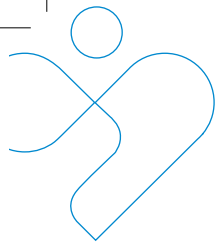
Aplikasi InZting adalah Pengembangan Digitalisasi Inovasi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang berdaya secara mandiri serta mampu mengupayakan kesehatan pribadi dan ketahanan keluarga secara optimal.

Dukungan dari seluruh komponen masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan *stunting* di Sulawesi Selatan. Tentunya program yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan di wilayah ataupun pada keluarga berisiko di masyarakat.

Selain Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, pada acara ini juga ikut dikukuhkan sebagai BAAS Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.P.L.G; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes; dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Andi Mirna, S.H.

Adapun prevalensi *stunting* di Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan SSGI 2022, sebesar 27,2 persen.

Editor: Santjojo Rahardjo



# Kepala BKKBN: Penyebab Banyaknya Perceraian Karena *Toxic People*



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)

■ Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti

**JAKARTA, BKKBN** – Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menyoroti tingginya angka perceraian di Indonesia. Menurut dokter Hasto, penyebab utama tingginya angka perceraian itu karena *toxic people*.

Hal tersebut disampaikan dokter Hasto saat menjadi narasumber pada kegiatan Konsolidasi Nasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang digelar di Asrama Haji, Jakarta Timur pada Jumat (27/10/2023).

Dokter Hasto mengatakan bahwa sejak 2015 angka perceraian meningkat pesat. Pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 581 ribu keluarga yang bercerai, sedangkan jumlah pernikahan setahun 1,9 juta. “Saat ini, (angka) perceraian tinggi karena banyak keluarga asalnya adalah

orang *toxic* bertemu orang waras, orang waras bertemu orang *toxic* atau orang *toxic* bertemu orang *toxic* akhirnya berkelahi terus dan terjadilah perceraian,” kata dokter Hasto.

Menurut dokter Hasto, bahwa mendidik keluarga cukup dengan asah, asih dan asuh. “Asah diajari ilmu agama yang baik, asih dikasihani dengan sebaik baiknya, asuh diimunisasi kemudian diberikan perlindungan yang baik,” kata dokter Hasto.

Dalam paparan terkait tema Keluarga, dokter Hasto menjelaskan bahwa pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa.

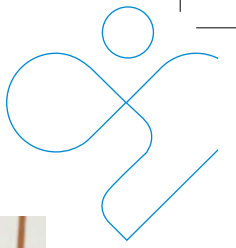
BKKBN kemudian mendefinisikan pembangunan keluarga itu adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yang hidup dalam lingkungan yang sehat. itu pasti harus bisa diwujudkan dengan tujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat hidup dengan rasa yang aman.



Saat ini, (angka) perceraian tinggi karena banyak keluarga asalnya adalah orang *toxic* bertemu orang waras, orang waras bertemu orang *toxic* atau orang *toxic* bertemu orang *toxic* akhirnya berkelahi terus dan terjadilah perceraian

Kemudian caranya banyak sekali dan kebijakannya bagaimana membangun ketahanan keluarga. Indonesia Emas 2045 menjadi tantangan serius sekali karena ada batu loncatannya, tahun 2030 harus terlampaui dengan baik, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang miskin ekstrem, dan *stunting*nya seharusnya sudah turun jauh, dan juga pendidikannya harus bagus.

Di akhir paparannya dokter Hasto menyampaikan pesannya terkait *stunting*. “Yang terakhir saya titip *stunting*, *stunting* itu pasti pendek, mereka yang tadi terlalu muda, terlalu tua, anemia, bayinya *stunting* dan bayi *stunting* itu baru umur 40 tahun sudah *central obes* sehingga mudah terkena penyakit. Nah makanya *stunting* itu menjadi momok bagi bangsa karena kemudian



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) hadir pada kegiatan Konsolidasi Nasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang digelar di Asrama Haji, Jakarta Timur.

pendapatannya orang *stunting* 20 persen lebih rendah dibandingkan yang tidak *stunting*, sehingga kalau kita ingin keluar dari *middle income trap* untuk menuju Indonesia Emas berat sekali, kalau *stunting*nya terlalu banyak. Panjang badan penting diukur jangan hanya berat badannya saja, karena banyak yang gemuk ternyata *stunting*,” ujar dokter Hasto.

“Anak anak kita yang ASI nya eksklusif baru dibawah 70 persen, yang tinggal di rumah tidak layak huni masih 57 persen, yang makanannya beragam di DKI Jakarta masih jauh lebih banyak dibandingkan di desa-desa, jadi tidak ada protein hewani. Jadi cegah *stunting* itu harus dengan protein hewani, telur atau lele,” lanjut dia.

Dan juga permasalahan menyusui, kalau ASI nya mau sukses susui lah sesering mungkin. Selama 6 bulan harus sesering mungkin diberi ASI tanpa diberikan makanan yang lain (ASI eksklusif). “Sempurnakanlah menyusui sampai 24 bulan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena 96 persen bayi itu sudah menutup otaknya dan ini sudah diteliti di seluruh dunia, maka itulah pentingnya 1000 HPK,” ungkap dokter Hasto.

Pada kesempatan yang sama hadir juga Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Dr. Hj. Syifa Fauzia, M. Art yang menyampaikan laporannya.

Ia mengatakan beberapa tantangan yang ada di daerah masing-masing di seluruh Indonesia, pihaknya dapat bersinergi dengan apa yang akan tentunya dilakukan pemerintah, khususnya BKKBN dan BKMT



Acara Konsolidasi Nasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).

dan komponen lainnya untuk dapat bisa mencari solusi bersama tentunya dengan kebersamaan kita di BKMT.

“Disini kita berbicara tentang bagaimana *stunting*, dan gizi buruk serta ibu hamil. Saya sebetulnya sangat sedih jika kita melihat di berbagai daerah, *stunting* gizi buruk, terutama pada ibu hamil ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh BKMT kalau kita lebih meluaskan program kita selain berdakwah, kita juga bisa melihat masyarakat perempuan dan anak disana. Apakah gizinya sudah terpenuhi, karena memang persoalan *stunting* ini jangan sampai terjadi apa lagi untuk anggota BKMT, ini harus kita sama-sama selamatkan,” ujar Syifa.

Editor: Kristianto



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) saat menghadiri Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetri & Ginekologi Sosial Indonesia (PIT HOGSI) ke-XV Tahun 2023 di Hotel Novotel Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

## Pesan Kepala BKKBN pada Dokter Kandungan: **Tolong Bantu Cegah Lahirnya Bayi *Stunting* Baru**

■ Penulis: Rizky Fauzia

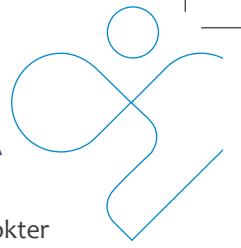
**BANDAR LAMPUNG, BKKBN** – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) berharap para dokter ahli kebidanan dan kandungan (*obgyn*) untuk membantu mencegah lahirnya bayi-bayi *stunting* baru.

Harapan tersebut disampaikan dokter Hasto pada acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetri & Ginekologi Sosial Indonesia (PIT HOGSI) ke-XV Tahun 2023 di Hotel Novotel Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu (18/10/2023).

“Mohon titip teman-teman dari sejawat obstetri sosial yang di NTT, Sulawesi Barat, Papua, NTB, Aceh,

Papua Barat, dan seterusnya, ini masih di atas 30 persen *stunting*nya. Kami mohon titip untuk ikut bersama-sama mempercepat penurunan *stunting* di wilayah-wilayah tersebut,” ujar dokter Hasto.

Dokter Hasto memaparkan, secara detailnya masih ada yang naik ada beberapa provinsi yang masih naik ini juga memprihatinkan. “*Related* dengan *stunting* sebetulnya juga ada korelasi yang sangat signifikan dengan angka *Total Fertility Rate* tadi, bagi yang TFR nya tinggi contoh Sulbar, Papua Barat, NTT *stunting*nya masih tinggi, sehingga harapan kami gerakan teman teman sejawat obsos (Obstetri & Ginekologi Sosial) bisa betul-betul menurunkan ini,” jelas dokter Hasto.



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) berpidato pada PIT HOGSI ke-XV Tahun 2023 di Hotel Novotel Bandar Lampung.

“Begitu juga *Age Specific Fertility Rate* untuk 15 sampai 19 tahun ini rata-rata masih 26 (*long form BPS*), setiap 1000 perempuan yang pernah melahirkan antara usia 15 sampai 19 pernah melahirkan atau hamil masih sekitar 26 orang dan Kalteng menjadi luar biasa dan kemudian Jambi dan NTB ini masih menjadi daerah yang perempuannya hamil dan melahirkan di usia muda,” kata dokter Hasto.

Dalam sambutannya, dokter Hasto yang juga seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan menjelaskan korelasi antara pencegahan *stunting* dengan angka kematian ibu dan bayi.

“Begitu juga *related* dengan itu juga kematian ibu dan kematian bayi sehingga ketika ingin menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tentu kita perjuangan juga punya latar belakang yang sama antara *stunting* kemudian juga TFR, CPR dan seterusnya. Saya kira kalau kita menurunkan angka *stunting* ini sekaligus menjaga *spacing*, *birth to birth interval*, *pregnancy interval* dan seterusnya,” ujar dokter Hasto.

Menurut dokter Hasto, pemberian tablet tambah darah kepada remaja yang mau menikah belum sukses. Demikian juga pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif juga masih belum memenuhi target.

“Bagaimana memberikan makanan kepada mereka yang *wasting* ini juga perlu didukung teman-teman sekalian, KB pasca persalinan masih 52,6 persen per semester 1 tahun 2023 ini dan *unwanted pregnancy* *alhamdulillah* tercapai akan tetapi *medical check up* bagi

catin masih prihatin, saya titip ke bapak ibu,” ujar dokter Hasto.

Dokter Hasto pun mengatakan optimistis target penurunan *stunting* 14 persen pada 2024 dapat dicapai dengan melihat tren penurunan *stunting* yang terjadi hingga saat ini. Hasto berharap dari acara PIT HOGSI XV 2023 ini dapat muncul program-program yang mendukung percepatan penurunan *stunting*. Karena yang dibutuhkan hari ini adalah ilmu-ilmu yang bisa terimplementasikan ditranslasikan dalam bentuk kebijakan.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya saat membuka acara ini pada Senin (16/10/2023) menyampaikan bahwa pencapaian prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang positif.

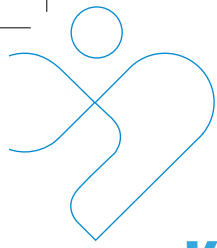
“*Alhamdulillah*, terkait penanganan *stunting* yang juga menjadi pembahasan pada pertemuan ini, pencapaian prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Lampung sejak 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan tren yang positif, dari 27,28 persen di tahun 2016, menjadi 18,5 persen di tahun 2021, dan 15,2 persen di tahun 2022. Pencapaian di tahun 2022 ini menempati peringkat ke-3 provinsi dengan *stunting* terendah se-Indonesia,” kata Arinal.

Acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetri & Ginekologi Sosial Indonesia (PIT HOGSI) ke-XV Tahun 2023 ini dimulai dari Pra PIT tanggal 13 - 15 Oktober 2023 dan PIT tanggal 16 - 18 Oktober 2023 dan serta telah dilakukan 9 *workshop* yang diikuti oleh 212 peserta dan 350 peserta yang terdaftar dalam kegiatan Simposium mendatang.

Editor: Kristianto



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menerima cinderamata dari anggota Himpunan Obstetri & Ginekologi Sosial Indonesia.



# Kepala BKKBN Optimistis Penurunan *Stunting* Capai Target 14 Persen pada 2024

■ Penulis : Fatimah

**JAKARTA, BKKBN** – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) optimistis upaya menurunkan *stunting* bisa mencapai target 14 persen pada 2024.

“Saya optimistis prevalensi *stunting* kita bisa mencapai 14 persen di tahun 2024,” kata dokter Hasto pada Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan di Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/10/23).

“Untuk akhir tahun 2023 ini target prevalensi *stunting*, harapannya itu mencapai 17,8 persen. Prevalensi *stunting* hari ini angkanya di 21,6,” tambah dokter Hasto.

Menurut dokter Hasto, optimisme ini berangkat dari data *stunting* yang terus menurun sejak 2013 hingga 2023. Berdasarkan data Riskesdas dari tahun 2013 - 2018 rata-rata penurunan *stunting* sebesar 1,3 per tahun per tahun. Data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), prevalensi *stunting* 2019 juga mengalami penurunan sebesar 1,3 persen.

Menurut Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), tahun 2021 - 2022 penurunan prevalensi *stunting* menurun hingga 2,8 persen pertahun dan untuk mencapai 14 persen dibutuhkan penurunan sebesar 3,8 persen per tahun. Dokter Hasto mengatakan hal tersebut tidak mustahil. “Dua tahun terakhir di masa pandemi tahun 2020 - 2021 prevalensi *stunting* kita turun 1,65 persen dan 2021 - 2022 turun 2,8 persen padahal waktu itu Perpres 72 Tahun 2021 belum dilaksanakan dengan baik dan konsekuen, belum disempurnakan dengan RAN Pasti (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*), pilar-pilar dan lain sebagainya, itu belum sempurna,” ujar dokter Hasto.

Sedangkan pada 2023 ini, dokter Hasto mengatakan pergerakannya masive, komitmen yang digerakan Wakil Presiden, Menko PMK dengan mengadakan *roadshow* yang luar biasa dan lain sebagainya.

Lebih jauh Dokter Hasto mengatakan untuk mencapai target tersebut dibutuhkan fokus konvergensi dengan dana desa sebesar 10 persen, dana kelurahan, PKH untuk pembelian program makanan tambahan lokal, dukungan lintas sektor untuk penguatan pengisian melalui Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil), Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Pendataan Keluarga (PK) juga penambahan Provinsi Prioritas menjad 17 Provinsi.

Dokter Hasto menjelaskan beberapa provinsi masih ada masalah, meski angka secara nasional turun tetapi



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) berpidato pada Rakortek Percepatan Penurunan *Stunting* di Kemayoran, Jakarta.

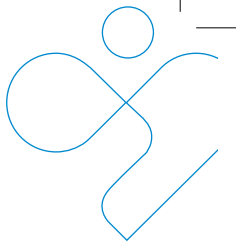
beberapa provinsi memiliki kenaikan seperti di NTT, Kalimantan Timur, Papua, “Provinsi-provinsi ini digenjot betul percepatan penurunan *stunting* dan dijadikan provinsi prioritas,” tegasnya.

Sementara itu Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, DR. Ir. Suprayoga Hadi, MSP mengatakan ada penambahan prioritas provinsi dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

“Tujuh provinsi dengan prevalensi *stunting* tinggi seperti Aceh, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, ditambah lima provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur, Banten dan Sumatera Utara, itu 12 provinsi. Nanti kita rencanakan tambah ini ada empat usulan dari Kemenko PMK, yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan satu lagi Sulawesi Selatan sebagai provinsi luar Jawa terbesar setelah Sumatera Utara, jadi pasien nambah bukan 12 jadi mungkin sekitar 17, nanti akan dilaporkan tim pelaksana kepada pengarah besok di Rakornas yang akan dihadiri Bapak Wakil Presiden,” kata Suprayoga Hadi.

Editor: Kristianto





# Kepala BKKBN Dorong Daerah Lakukan Audit Kasus *Stunting*

■ Penulis: Rizky Fauzia

**JAKARTA, BKKBN** – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) mendorong pelaksana percepatan penurunan *stunting* di daerah-daerah untuk melakukan Audit Kasus *Stunting* (AKS).

“Audit Kasus *Stunting* ini sebetulnya belajar bersama ketika kita menemukan kasus *stunting* dan kasusnya itu yang spesial maka kita sama sama mempelajari bersama para ahli. Jadi membukakan mata bahwa *stunting* itu tidak hanya cukup diberi makan saja tapi harus faktor-faktor yang kompleks itu semua teratasi tetapi dengan studi kasus mengurai kasus itu, sehingga ketika teman-teman yang di daerah itu di TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) ikut bersama-sama diskusi tentang kasus dalam atasi *stunting* terbuka dia wawasannya, hal-hal seperti ini yang bisa kita temukan adalah masalahnya yang mendasari dan kita cari solusinya.”

“Inilah pentingnya Audit Kasus *Stunting* menemukan diagnosis yang tepat,” kata dokter Hasto saat memberi arahan pada Pelaporan Khusus Pelaksanaan Audit Kasus *Stunting* tahun anggaran 2023 secara daring pada Selasa sore (17/10/2023).

Menurut dokter Hasto, Audit Kasus *Stunting* sangat mudah diselenggarakan. “Kegiatan AKS ini kan mudah sebetulnya karena apa, tidak perlu mencari akseptor, tapi ini kan cuma pertemuan kasus yang *stuntingnya* tidak perlu di datangkan tinggal bagaimana menggerakkan di kecamatan,” tambah dokter Hasto.

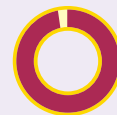
Dokter Hasto juga menyarankan agar pelaksanaan Audit Kasus *Stunting* memanfaatkan teknologi informasi saat ini bila ingin melakukan sosialisasi dengan orang banyak melalui pertemuan virtual.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti, SE., M.T yang juga hadir memberikan sambutan mengatakan Audit Kasus *Stunting* telah mengalami kemajuan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2022.

Di tahun 2023 ditemukan kendala lain dan BKKBN dengan cepat melakukan upaya-upaya mengatasinya. Beberapa upaya telah dilakukan BKKBN Pusat, dalam hal ini melalui Dirbalnak untuk pelaksanaan percepatan audit *stunting* yaitu melakukan praktik baik kasus audit *stunting* Indonesia tahun 2023,” ungkap Nopian.

Sementara itu, Direktur Bina Keluarga dan Anak (Dirbalnak) BKKBN dr. Irma Ardiana, MAPS papar-

## Capaian 4 Indikator Audit Kasus *Stunting* 2023



97%

Kabupaten/kota telah membentuk Tim Audit Kasus *Stunting*



86%

Kabupaten/kota telah melaksanakan Audit Kasus *Stunting* dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun



85%

Kabupaten/kota telah mendiseminasikan hasil audit kasus *stunting* dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun



81%

Kabupaten/kota telah menindaklanjuti hasil Audit Kasus *Stunting* dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali setahun.

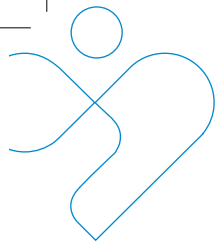
Sumber: SIPASTI 2022

kan manfaat-manfaat Audit Kasus *Stunting* untuk menyemangati jajaran BKKBN dan TPPS dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* hingga 14 persen tahun 2024 nanti.

Pelaporan Khusus Pelaksanaan Audit Kasus *Stunting* TA 2023 dilakukan secara daring pada Selasa sore (17/10/2023). Pertemuan ini bertujuan mendengarkan laporan-laporan pelaksanaan Audit Kasus *Stunting* dari 5 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan NTT.

Sebanyak 97 persen kabupaten/kota telah membentuk tim audit kasus *stunting*, 86 persen sudah melaksanakan audit kasus *stunting* dan manajemen pendampingan keluarga. Sebanyak 85 persen kabupaten/kota sudah mendiseminasikannya dan 81 persen menindaklanjuti hasil dari audit kasus *stunting*. Audit kasus *stunting* ini bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* kompleks agar bisa mencegah kasus serupa terjadi.

Editor: Kristianto



# Tim Pendamping Keluarga Kunci Percepat Turunkan *Stunting*



Kelas Tim Pendamping Keluarga yang Handal, berEmpati, dan bersahaBat (TPK Hebat) Seri V Tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual.

■ Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti

**JAKARTA, BKKBN** – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG. (K) mengatakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan kunci percepatan penurunan *stunting*.

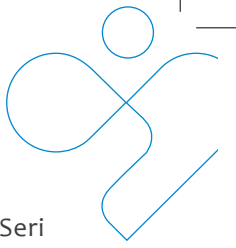
“Yang paling memaknai kesuksesan penurunan *stunting* adalah TPK (Tim Pendamping Keluarga). Karena keberadaan TPK memegang peran sentral dalam melihat, mengamati dan juga mengawal *treatment* yang diberikan atau penanganan yang diberikan pada keluarga berisiko *stunting*. Kalau TPK tidak ada, kita semua kacau,” kata dokter Hasto saat membuka Kelas Tim Pendamping Keluarga yang Handal, berEmpati, dan bersahaBat (TPK Hebat) Seri V Tahun 2023 secara virtual. Acara ini diselenggarakan secara *hybrid* di Jakarta pada Selasa (17/10/2023).

Menurut dokter Hasto, TPK adalah kunci dalam percepatan penurunan *stunting*. “Kalau ketua TPPS, Satgas, Kepala BKKBN Provinsi, kemudian Direktur, atau saya sekalipun Kepala BKKBN pusat ini tidak ada, maka

cepat sekali mudah mencari gantinya. Tapi kalau TPK tidak ada maka luar biasa sulit untuk mencari penggantinya. Apalagi kalau ramai-ramai TPK tidak bekerja. Itulah yang memaknai hidup kita, bukan yang menjadi bos, tetapi justru mereka yang paling ada di bawah dan paling dekat dengan masalahnya, dan itulah TPK. Jangan dinomorduakan untuk urusan terkait dengan TPK,” kata dokter Hasto.

Menurut dokter Hasto, ada tiga tantangan berat dalam percepatan penurunan *stunting*. Pertama, mengubah *mindset* keluarga dan masyarakat dalam hal lingkungan yang bersih dan sehat. Kedua terkait *mindset* pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.

“*Mindset* berikutnya adalah kesehatan reproduksi. Kalau tadi tentang nutrisi harapan saya jangan boros-boros, tidak harus ikan tuna, ikan salmon, tidak harus daging sapi, mahal tapi kurang mengandung omega 3, telur dan lele sudah cukup. Karena lele mengandung omega 3 sehingga cukup untuk ibu hamil dan anak-anak. Jadi kalau daging sapi mahal, pilih aja lele. Ingat produk



lokal harus diutamakan jangan mie terus. Ayo kita pakai karbohidrat lokal,” ujar dokter Hasto.

### Gizi Seimbang

Sementara itu Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardiana, MAPS dalam laporannya mengatakan pada seri V akan fokus pembahasannya pada tiga hal, yang pertama adalah pemantauan Elsimil, membahas bagaimana hasil pemantauan elsimil terhadap kelompok sasaran, khususnya bumil, dan bufas.

“Pada seri kelima ini kita juga akan mendapatkan pembekalan seperti apa teknik KIE yang efektif dan efisien, dimana ini agenda rutin kita di setiap TPK hebat selalu ada pembahasan tentang anjuran atau juga penyuluhan untuk gizi seimbang bagi seluruh kelompok sasaran dari pendampingan TPK,” kata Irma.



Pada kesempatan kali ini Kelas TPK Hebat Seri V membahas juga informasi mengenai kondisi ideal untuk hamil sehat, yang disampaikan oleh Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN Marianus Mau Kuru, S.E., MPH.

Sementara itu, hadir narasumber dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, dr. Pandu Riono, MPH., Ph.D. yang menyampaikan tentang cara komunikasi yang sukses.

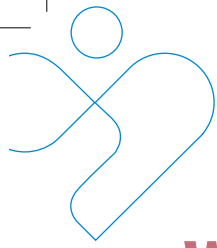
“Komunikasi yang sukses tentunya disebabkan oleh beberapa hal yaitu *clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, courteous*, ini semua adalah teori intinya kita harus tau apa yang kita sampaikan dan bisa dipahami apa tidak jika tidak bisa dipahami kita harus lakukan penjelasan berulang-ulang kali atau kita ubah cara penyampaiannya, ketika kita berbicara jangan seperti robot kaku harus ada strukturnya harus ada sedikit emosi supaya hidup,” kata Pandu Riono.

Untuk sesi terakhir hadir dari Founder Gizi Nusantara Esti Nurwanti, S.Gz., R.D., MPH., Ph.D yang menyampaikan terkait asupan gizi. “Tips tinggi badan optimal pada anak, yang pertama asupan gizi yang baik, konsumsi kalsium dan vitamin D, olahraga dan aktivitas fisik, kemudian makanan untuk menambah berat badan anak yaitu ada sayuran dan buah buahan, lemak sehat, makanan kaya kalori, ada juga daging, telur, karbohidrat, susu dan produk susu,” kata Esti.

Editor: Kristianto

### KONDISI IDEAL UNTUK HAMIL SEHAT

- Usia antara 20 – 35 tahun
- Status gizi normal/ IMT 18,5 – 25,0
- Memiliki tinggi badan  $\geq 145$  cm
- Tidak KEK / LiLA  $\geq 23,5$  cm
- Tidak anemia / Hb  $\geq 12$  g/dL
- Jumlah anak  $\leq 2$  orang
- Jarak antar kehamilan  $\geq 2$  tahun
- Tidak mempunyai riwayat obstetri yang buruk pada kehamilan sebelumnya
- Tidak mempunyai riwayat dan/atau sedang menderita penyakit kronis atau penyakit dalam kondisi terkontrol, seperti darah tinggi, diabetes, kanker, masalah kejiwaan dan lainnya
- Baik perempuan maupun pasangannya tidak mengidap penyakit menular dan penyakit menular seksual seperti TB Paru, Malaria, IMS dan lainnya atau penyakit dalam kondisi terkontrol seperti HIV, hepatitis B.



# Wabup Sumbawa Barat Sebut *Stunting* Akibat Asupan Makanan Cepat Saji

■ Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti

**JAKARTA, BKKBN** – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Fud Syaifuddin, S.T. beraudiensi dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) di kantor BKKBN Pusat di Jakarta, Senin (16/10/2023).

Wakil Bupati Fud dalam kunjungan kerja beserta jajarannya menyampaikan inovasi dan program percepatan penurunan *stunting* yang sudah dilaksanakan. Fud juga menyampaikan salah satu penyebab *stunting*, terutama di kawasan pertambangan, adalah makanan instan atau cepat saji.

“Dan ada juga anak *stunting* bukan karena miskin, tetapi orang tuanya yang gaya hidupnya susah ya, tidak disesuaikan dengan anaknya. Sering dikasih makanan yang instan contohnya dan itu seringkali terjadi di daerah pertambangan,” kata Fud.

Selanjutnya Fud melaporkan data *stunting* di Kabupaten Sumbawa Barat yang turun sedikit dari 8,7 sekarang menjadi 7,6 (E-PPGBM). “Kalau dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) kami kemarin (2022) 13,9 persen. Dari SKI (Survei Kesehatan Indonesia 2023) kami berada di 10 persen,” kata Fud.

Menurut Fud, untuk menunjang turunnya angka *stunting*, pihaknya membuat lomba inovasi di desa dan kelurahan.

“Seluruh desa dan kelurahan kami kasih anggaran dari APBD untuk berinovasi, dan sekitar November nanti kita akan umumkan juaranya,” ujar Fud.

“Kami juga bekerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, bentuknya pemberian beasiswa bagi anak *stunting* yang diambil setelah SMA. Jadi juaranya minimal harus 30 juta, dan dapat diambil tetapi setelah dia masuk SMA,” lanjut Fud.

Guna menekan angka kemiskinan, Fud mengatakan Pemkab memberikan modal bagi keluarga yang menderita *stunting* terutama dari permukiman dan memberikan

bantuan rumah bagi yang ada anaknya *stunting* di keluarga tersebut. Jika rumah yang dihuni tidak layak maka akan diadakan renovasi rumahnya.

“Di bidang UMKM jika ada keluarga yang *stunting* dan mempunyai usaha juga kita berikan modal, karena bagaimanapun *stunting* ini kan tidak melihat kemiskinan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKKBN dokter Hasto mengapresiasi Sumbawa Barat. “Kita semua masih berupaya keras menuju ke 14 persen, tapi Sumbawa Barat sudah mencapai 13,9 persen,” kata dokter Hasto.

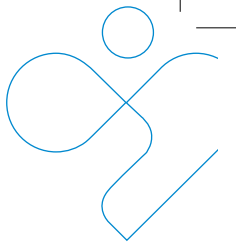
Dokter Hasto mengatakan m-CPR untuk Sumbawa Barat 56,9 persen. “*Stunting*nya sudah bagus, mungkin peserta KB nya bisa ditingkatkan menjadi 60 persen. Kemudian *unmet need* itu artinya keluarga yang seharusnya ber-KB, tapi tidak ber-KB itu ada 17,6 persen,” ujar dokter Hasto.

“Kalau untuk prevalensi balita *stunting* saya kira ini juga sungguh luar biasa, penurunan yang sangat signifikan hampir 10 persen dari 2021 - 2022 berkat upaya yang sangat baik saya kira karena yang Kabupaten/Kota lainnya justru naik, yang turun se NTB hanya Sumbawa Barat,” kata dokter Hasto.

Editor: Kristianto



Kepala BKKBN, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) saat audiensi dengan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin.



# Kepala BKKBN Paparkan Strategi Turunkan *Stunting* kepada Lurah dan Kades



Kepala BKKBN, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)

■ Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti

**JAKARTA, BKKBN** – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memaparkan strategi percepatan penurunan *stunting* kepada para lurah dan kepala desa.

Paparan strategi tersebut disampaikan dokter Hasto dalam Webinar Praktik Baik Desa/Kelurahan Bebas *Stunting* (De'Best) pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Seri 6 yang diselenggarakan secara virtual dan ditayangkan *live* melalui Youtube Channel @BKKBN Official, Selasa (24/10/2023).

“Kalau satu desa, katakan penduduknya 1.000 paling banyak yang hamil adalah 22. Sehingga per bulan bisa dilihat paling banyak 2 karena kalau 2 sebulan kalau setahun berarti 24, sehingga saya yakin kalo sebulan yang lahir 2 itu rata-rata yang nikah itu cuma 1 kalau penduduknya 1.000.”

“Sementara Tim Pendamping Keluarga (TPK) membantu kepala desa ini ada tiga orang, ada satu bidan, satu PKK, satu Penyuluh KB sehingga kalau penduduknya 1.000 pun itu masih terjangkau. Jumlah baduta itu hanya 2 saja, jumlah balita sekitar 110 sehingga kalau yang *stunting* 20 persen kira-kira 20 balita. Begitu juga kalau penduduknya 2000 tinggal di kalikan 2 saja,” kata dokter Hasto.

Menurut dokter Hasto, keberhasilan percepatan penurunan *stunting* sangat tergantung dari langkah-langkah yang dilakukan aparat desa.

“Sangat ditentukan oleh desa oleh karena itu saya mengimbau kepada seluruh desa tentunya bisa mengikuti program Bina Keluarga Balita (BKB) dan juga

menghidupkan kembali posyandu yang tentu di dalamnya ada kegiatan BKB dan juga selalu menjalankan program secara holistik dan terintegrasi, inovasi inovasi sangat di butuhkan dan penting sekali,” ujar dokter Hasto.

Dokter Hasto berpesan agar komitmen-komitmen dibangun dari Pusat agar kepala desa, lurah semangat untuk melakukan kegiatan terbaik dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.

“Kemudian juga bagaimana Air Susu Ibu (ASI) eksklusif harus di perhatikan betul pada balita terutama pada bayi umur 6 bulan dan juga makanan tambahan atau makanan pendamping asi dan tambahan makanan untuk ibu hamil itu hal hal yang penting yang harus di perhatikan,” jelas dokter Hasto.

Sementara itu anggota Komisi IX DPR-RI Dr. Hj Kurniasih Mufidayati, M.Si mengatakan pentingnya membentuk desa bebas *stunting*.

## Inovasi Desa Bebas *Stunting*

Sementara itu hadir juga narasumber dari para Kepala Desa yang memaparkan inovasi-inovasi yang telah dilakukan di desanya masing-masing dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

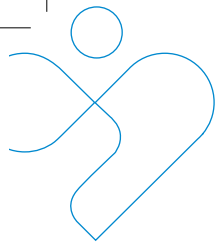
Kepala Desa Voa'a, Yuniman Kantohe menjelaskan beberapa inovasi yang telah dilakukan di desanya Voa'a antara lain; AYAH JAGAI BUNDA (AJAIB), sosialisasi 1000 HPK kerjasama dengan kader dan PLKB desa, inovasi Jumat pagi bersihkan lingkungan anda (JUMPA BERLIAN).

Ada juga inovasi beri dua ribu cegah *stunting* (BERBUAT), inovasi Mari Atasi *Stunting* dengan Pangan Lokal (MARI SMOKOL).

Sementara Kepala Kampung Mawokauw Jaya Edyson Raфра memaparkan beberapa inovasi yang telah dilakukan di wilayahnya untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*. Yakni, penguatan dan peningkatan kapasitas kader, penyediaan sarana pendukung, pemberian makan tambahan dan vitamin, dan pemberian makanan tambahan.

Kepala Desa Boitan, Dahlan Lambause yang memaparkan beberapa inovasi dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya. Ada inovasi Mompotau *stunting*; Posyandu prakonsepsi; Ayah/bunda asuh anak *stunting*; Pergi subuh lewat Posyandu pra konsepsi; Ambulans dering ibu hamil; Satu juta satu pekarangan bidang TPHP, perikanan, peternakan dan ketahanan, pangan; JAMIL BERSAMA DWI (Jaringan Ibu Hamil Bersama Dasa Wisma).

Editor: Kristianto



# Kolaborasi Pekan Pelayanan KB Raih 1,6 Juta Akseptor, BKKBN Beri Penghargaan TNI AD

■ Penulis: Fitri Aminatul Azizah/M. Azis Antony

**KOTA CIMAH, BKKBN** – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar kolaborasi Pekan Pelayanan KB dengan capaian 1,6 juta akseptor. BKKBN sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan *Stunting* mengapresiasi setinggi-tingginya upaya gigih dari jajaran TNI AD. Terkhusus atas suksesnya target 1,5 juta pelayanan KB hasil kolaborasi antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan TNI AD dan Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia.

Pemberian penghargaan tersebut, dilaksanakan di momen Puncak Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia (*Word Contraception Day*) dengan tema “Kolaborasi Pelayanan KB Nusantara dalam Percepatan Penurunan *Stunting*” di Lapangan Rajawali Kota Cimahi pada Senin (23/10/2023).

Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) mengatakan bahwa pelayanan KB momentum ini merupakan bukti nyata bahwa masalah *stunting* tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan kerja sama semua elemen masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga di Hari Kontrasepsi Sedunia ini bisa menjadi contoh *best practice* kita bergotong-royong berkolaborasi

antara BKKBN, TNI, masyarakat, dan juga para kader,” ujar dokter Hasto.

“Melalui program ini, kita dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga melalui penjarangan atau pembatasan kelahiran melalui kontrasepsi. Dengan begitu, kita dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan cerdas,” ucapnya dalam acara yang dihadiri sekitar 1000 orang tersebut.

Upaya penurunan prevalensi *stunting*, kata dokter Hasto, tidak lepas dari peran program KB dalam perencanaan keluarga yang merupakan hak dasar setiap individu. “Upaya kita bersama dalam penurunan *stunting* ini adalah langkah penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Mari kita terus bekerja sama dengan tekun, berkomitmen, dan bersemangat untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045,” ajak dokter Hasto.

Dalam kesempatan ini dokter Hasto juga memberikan bantuan telur untuk 30 Keluarga Berisiko *Stunting*. Juga memberikan edukasi gizi kepada remaja, ibu hamil, pascapersalinan, ibu dengan baduta dan balita. Secara langsung dokter Hasto pun turun tangan untuk memberikan pelayanan KB kepada masyarakat dengan memasang alat kontrasepsi implan kepada akseptor di klinik Kesdam Siliwangi.

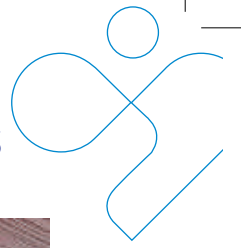
## Gerakan ASI Eksklusif

Di rangkaian acara yang sama, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Rachma Setyaningsih Dudung Abdurachman melakukan kunjungan ke Posyandu BKB Mawar 1 Yon Armed 4/Parahyangan. Selain meninjau kegiatan di Posyandu, dirinya juga memberikan pembinaan bagi para kader serta peserta ibu-anak yang hadir.

Guna menyokong suksesnya perencanaan keluarga, Rachma secara serentak di lingkungan TNI AD, ASN, dan keluarganya, mendeklarasikan Gerakan ASI Eksklusif. “Saya menghimbau kepada seluruh TNI AD bersama-sama mendukung dan menjadi *role model* dalam gerakan ASI eksklusif agar



Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat  
Mayor Jenderal TNI dr. Sukirman, Sp.KK., M.Kes., FINSDV, FAADV.



Pemberian penghargaan kepada TNI AD pada Puncak Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di Lapangan Rajawali Kota Cimahi.

menyebarkan dan menyeluruh dalam lapisan masyarakat, memberikan daya ungkit yang besar dalam mencapai target 14 persen angka *stunting* yang tinggal beberapa bulan lagi,” kata Rachma.

Menurut Rachma, dengan adanya edukasi dan konseling menyusui untuk ibu hamil, memungkinkan mereka untuk lebih siap menyusui sesegera mungkin setelah lahir. “Kita menyadari bahwa setiap ibu memerlukan lingkungan yang positif, agar mampu memberikan inisiasi menyusui dini, menyusui eksklusif, dan melanjutkan menyusui hingga 2 tahun,” ucapnya.

Para Kader ASI Eksklusif yang berdialog secara daring memandangi gerakan ini sebagai tonggak dari perwujudan semangat keluarga TNI untuk menghasilkan SDM yang sehat dan berkualitas.

#### Capaian 114 Persen

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd melaporkan bahwa untuk pekan Pelayanan KB serentak yang dilaksanakan dari tanggal 26 September sampai dengan 9 Oktober 2023, berhasil melayani jumlah sasaran sebesar hampir 1.693.520 akseptor, dengan target 1.484.747 akseptor atau dengan capaian sebesar 114,06 persen.

“Dari 33 Provinsi, sebanyak 25 Provinsi berhasil mencapai target diatas 100 persen. Hal tersebut, tentu berkat dukungan semua pihak khususnya jajaran TNI AD dan Mitra Kerja lainnya, serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada puncak peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia hari ini, akan diberikan penghargaan kepada para pihak yang dengan kriteria tertentu, akan diberikan penghargaan,” ujar Teguh.

#### Perencanaan Keluarga

Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI dr. Sukirman, Sp.KK, M.Kes., FINSDV., FAADV

mengatakan bahwa kemampuan untuk merencanakan kehamilan termasuk memilih kontrasepsi juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi perempuan. Di sisi lain, kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak bisa dimaksimalkan.

“Saya berharap masyarakat di semua lini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada,” ujar Sukirman.

Adapun pemenang kategori Fasyankes TNI AD dengan pelayanan kontrasepsi terbanyak untuk seluruh metode diraih oleh Klinik Pratama Kartika 11 Pemalang dengan total 2.434 akseptor.

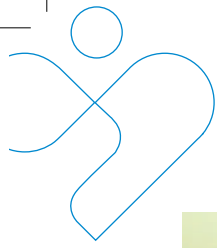
Kemudian, di posisi ke dua diraih oleh FKTP Poskes 01.10.13 Kuala Tungkal/Tanjab dengan total 1.865 akseptor. Sedangkan di posisi ke tiga diraih oleh Polkes Bulukumba dengan total 807 akseptor.

Untuk kategori Fasyankes TNI AD dengan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang terbanyak, kembali dimenangkan oleh Klinik Pratama Kartika 11 Pemalang dengan total 1.249 akseptor. Pada posisi kedua, ditempati oleh Klinik Pratama Kartika 10 Pekalongan dengan raihan 480 akseptor. Sedangkan Polkes Bulukumba menduduki posisi ketiga dengan perolehan 289 akseptor.

Apresiasi juga diberikan kepada 10 provinsi dengan persentase pelayanan KB seluruh metode terbanyak dibandingkan dengan target, secara berurutan dari yang tertinggi yaitu Lampung, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Gorontalo.

Selain oleh jajaran TNI AD, Pimpinan Tinggi BKKBN, Pemerintah Daerah Jawa Barat, Tim Pendamping Keluarga, Kader, IMP Kota Cimahi, turut hadir serta mitra kerja meliputi PP IBI, IDAI, POGI, PKMI, Bayer, Harsen, Tanoto Foundation, BCA, Dexa Medika, Kimia Pharma, Klik Dokter, DKT Indonesia, dan PKBI Jawa Barat.

Editor: Kristianto



Kegiatan Monev Terpadu Pasca Roadshow Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

# Tim Terpadu 19 Kementerian Observasi Posyandu dan Keluarga Berisiko Stunting

■ Penulis: Aulia FDA

**MAGELANG, BKKBN** – Pasca diselenggarakannya “Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” di Jawa Tengah secara daring pada awal Februari lalu, Selasa (11/10), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan BKKBN bersama 18 Kementerian/Lembaga lainnya bergerak ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Di kabupaten ini mereka melakukan kegiatan *Monitoring* dan *Evaluasi (Monev) Terpadu Pasca Roadshow Percepatan Penurunan Stunting*.

Didampingi Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi serta Pemerintah Kabupaten Magelang, rombongan tim monev terpadu bertolak ke Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan.

Tujuannya, untuk memastikan langsung pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tengah masyarakat.

Setidaknya, ada empat lokasi di Desa Gondowangi yang akan dikunjungi dan diobservasi oleh tim, yaitu Posyandu “Anggrek” di Dusun Penggaron dan tiga rumah Keluarga Berisiko Stunting dengan sasaran ibu hamil (bumil), bayi di bawah usia dua tahun (baduta) dan bayi di bawah usia lima tahun (balita) di Dusun Pengaron Lor dan Padureso.

Sebagai informasi, Kabupaten Magelang tercatat sebagai salah satu dari 12 kabupaten/kota yang tergolong tinggi angka prevalensi stunting di Jawa Tengah, menempati peringkat ketiga teratas.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

Tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Magelang tercatat 28,20 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 20,8 persen.

Ratna Dewi, salah satu anggota tim monev yang berasal dari Kemenko PMK yang ditemui di sela-sela observasi, menuturkan bahwa kegiatan monev terpadu ini merupakan arahan langsung dari Menteri Koordinator PMK, khususnya di 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting dimana Jawa Tengah termasuk di dalamnya.

Ia menceritakan sedikit pengamatannya di posyandu yang dikunjungi, bahwa ternyata tingkat kehadiran baduta maupun balita ke posyandu hanya berkisar 70 persen.

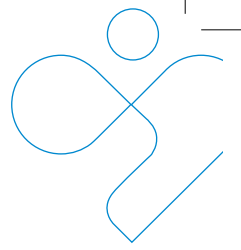
Sementara itu, saat observasi di rumah keluarga berisiko stunting ditemukan juga ketiadaan kepemilikan jamban di rumah tersebut.

Camat Sawangan, Yusuf Ari Wibiwo, yang turut mendampingi tim dalam monev tersebut menjelaskan juga bahwa desa yang dikunjungi oleh tim monev tersebut merupakan salah satu desa yang menjadi lokus penanganan stunting di Kabupaten Magelang.

“Kami pemerintah Kecamatan Sawangan dalam rangka mengupayakan untuk menurunkan kasus stunting mempunyai sebuah gerakan yang kita beri nama *Gotong Sak Cething* atau *Gotong Royong Sawangan Gerak Cegah Stunting*,” ungkapnya.

Editor: Santjojo Rahardjo





# BKKBN Evaluasi Program Penurunan *Stunting* di Wilayah Perbatasan, Pesisir dan Rawan Pangan

■ Penulis: Rizky Fauzia

**JAKARTA, BKKBN** – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengevaluasi program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) Terpadu Berbasis Wilayah Perbatasan, Pesisir, dan Rawan Pangan (P2R).

Evaluasi sekaligus finalisasi laporan itu meliputi tiga provinsi mewakili wilayah pesisir (Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat), perbatasan (Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat) dan rawan pangan (Kabupaten Rokan Hulu, Riau) periode Juni hingga Juli 2023.

Tujuannya untuk mengetahui gambaran sejauh mana implementasinya serta memberikan umpan balik dan memberikan rekomendasi bagi upaya percepatan penurunan *stunting* di wilayah P2R.

“Peserta (responden) daerah terdiri dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten, TPPS kecamatan, TPPS desa, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam hal ini di lima desa,” kata Program Officer Bidang Program dan Kegiatan Sekretariat PPS Dr. dr. Lucy Widasari, M. Si saat memaparkan draft laporan Monev tersebut pada Senin (16/10/2023) di Park Hotel Cawang, Jakarta.

Laporan ini akan diselesaikan dalam bentuk buku pada awal November 2023. Lucy berharap dari hasil *monitoring* evaluasi ini bisa memperbaiki pelaksanaan program ke depan. “Hasil yang diharapkan adalah gambaran program dan kegiatan atau intervensi yang telah dilaksanakan secara maksimal dalam upaya perbaikan berkelanjutan, kemudian mendapatkan solusi terbaik dari masalah dan kendala yang ada sehingga *output* yang dihasilkan akan terus bertahan dan berkembang lebih baik,” ujar Lucy.

Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardiana, M.APS mengatakan kegiatan ini memberi masukan yang luar biasa karena dalam pelaksanaan PPS banyak keterbatasan. “Namun kita juga memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan. Forum-forum seperti ini sangat penting menurut kami, dari pusat juga bisa membaca atau memahami konteks di daerah itu ternyata tidak semudah kita untuk merumuskan panduan, merumuskan juknis dan seterusnya,” jelas Irma.



Evaluasi program PPS Terpadu Berbasis Wilayah Perbatasan, Pesisir dan Rawan Pangan.

Ia berharap program-program BKKBN bisa dikolaborasikan dengan program kementerian/lembaga lainnya seperti kegiatan dapur sehat atasi *stunting* di mana di lapangan bisa dikolaborasikan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Kementerian Kesehatan.

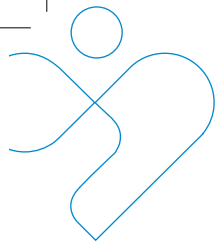
Rekomendasi hasil monev diharapkan bisa merucut untuk dijadikan sebagai landasan penetapan strategi ke depan dan pentingnya keterlibatan dari sektor-sektor terkait seperti para akademisi, kata dia.

## 6 Poin Masalah

Sementara itu Pakar Gizi Universitas Hasanuddin Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc., Sp. GK yang juga hadir memberikan masukan 6 poin permasalahan dalam monev pada program percepatan penurunan *stunting*. Pertama adalah Indikator yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam keberhasilan program. Kedua adanya keterbatasan data dan sistem informasi. Ketiga, kurangnya kapasitas tim monev dapat memengaruhi validitas dan kehandalan hasil evaluasi.

Keempat, tantangan dalam mengukur dampak jangka panjang, ini menjadi soal besar karena *stunting* ini mempunyai dampak jangka panjang. Kelima, kurangnya pelibatan pemangku kepentingan. Keenam, koordinasi dan tata kelola yang lemah. Ia pun berharap semua yang disebutkan tadi bertujuan untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan program PPS.

Editor: Kristianto



# Perkuat Pendampingan Calon Pengantin dan Keluarga Berisiko *Stunting* di Regional Timur Indonesia

■ Penulis: Fitri Aminatul Azizah

**MATARAM, BKKBN** – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memperkuat pendampingan bagi calon pengantin dan keluarga berisiko *stunting*.

“Ini adalah upaya taktis yang menyentuh *grass root* pada tatanan lini lapangan agar dapat berjalan dengan baik. Tentu perlu ada sarana yang mampu menyampaikan pada tingkat lini lapangan, salah satu instrumen penting adalah para mentor yang memberikan edukasi dan pendampingan kepada TPK (Tim Pendamping Keluarga) sejumlah 600 ribu di Indonesia. Inilah yang menjadi penting untuk mengorkestrasi kegiatan pada *level* lini lapangan,” ucap Sekretaris Utama Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, yang hadir secara daring dalam malam pembukaan *workshop* di Hotel Astoria Lombok, Minggu (29/10/2023).

*Workshop* Pendampingan Calon Pengantin dan Keluarga Berisiko *Stunting* bagi Mentor Tim Pendamping Keluarga dijadwalkan berlangsung selama 8 hari dari 29 Oktober sampai 5 November 2023 mendatang.

*Workshop* tersebut menyasar mitra-mitra lini lapangan sebagai mentor tim pendamping keluarga agar tercipta

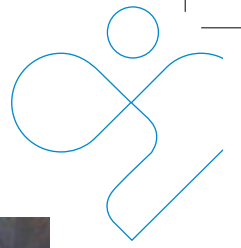
konvergensi percepatan penurunan *stunting* di lini lapangan. Peserta dalam *workshop* tersebut berasal dari regional timur yaitu NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Tavip menyebutkan, fase kehidupan dari sebelum menikah, hamil, kemudian pasca salin, menjadi fase yang penting dalam penanganan *stunting*. “Data calon pengantin di semua provinsi dapat dengan mudah didapatkan, setiap daerah bisa memproyeksikan. Kemudian dari data yang ada, dapat dilakukan deteksi awal menggunakan ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) untuk mengetahui status kesehatan calon pengantin,” terangnya.

Menurut Tavip, TPK bisa fokus untuk mendampingi calon pengantin dengan status kesehatan yang belum baik, hal tersebut penting karena 80 persen calon pengantin ketika sudah menikah langsung hamil. “Dengan adanya deteksi awal, maka dapat mencegah calon bayi-bayi *stunting* baru. Disini kita berikan intervensi sampai calon ibu siap hamil dengan sehat. Karena kalau anak sudah terlanjur lebih dari usia 2 tahun, maka



Pembukaan *workshop* Pendampingan Calon Pengantin dan Keluarga Berisiko *Stunting* bagi Mentor Tim Pendamping Keluarga.



Workshop Pendampingan Calon Pengantin dan Keluarga Berisiko Stunting bagi Mentor Tim Pendamping Keluarga di Hotel Astoria, Lombok.

intervensinya menjadi lebih sulit untuk mengoreksi ke kondisi normal,” kata Tavip.

Menyinggung RAN Pasti (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting), yang merupakan penjabaran dari Perpres 72 tahun 2021, Tavip mengatakan agar daerah tinggal mengikutinya saja. “Tujuan memuat aturan secara rinci adalah agar pemerintah daerah maupun *stakeholder* di daerah tinggal melaksanakan dan tidak perlu membuat rencana aksi daerah, agar waktunya lebih efektif untuk implementasi langsung penanganan *stunting*. Memang kalau kita bicara waktu, untuk mewujudkan angka *stunting* 14 persen sisanya tidak lebih dari satu setengah tahun efektif,” ucap Tavip.

“Untuk intervensi *stunting*, BKKBN memiliki sumber data PK (Pendataan Keluarga) yang *update* setiap tahun. Di situlah muncul data Keluarga Berisiko Stunting, dengan berbagai indikator, maka kita bisa fokus identifikasi secara akurat, kemudian intervensi dengan melakukan pendampingan sesuai faktor risikonya,” ajak Tavip.

Masih dalam rangkaian acara yang sama, diluncurkan platform Youtube Channel “Siap Nikah” sebagai media edukasi dan penyebaran materi perencanaan keluarga kepada sasaran yaitu calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), dan lainnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Drs. Lalu Makripudin, M.Si, menyebutkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bisa *by design* dan bukanlah takdir, melainkan dapat diusahakan untuk ditingkatkan, “anggapan yang keliru bahwa *stunting* itu takdir, padahal kita bisa cegah *stunting*. Itulah yang namanya kualitas SDM bisa kita *design*, tentunya dengan intervensi,” katanya.

“Ketika TPK di lapangan mengalami kesulitan pendampingan, diharapkan peserta bisa memberikan pembinaan kepada TPK, karena kita sangat mengantungkan harapan kepada TPK di lapangan. Merekalah yang melihat langsung kondisi keluarga risiko *stunting*, jika

ini berhasil maka *insya Allah* angka *stunting* akan berhasil diturunkan sesuai target 14 persen,” ujar Lalu.

Lalu mengatakan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di NTB memiliki jargon “GASPOL” yang merupakan akronim dari gerakan atasi *stunting* secara profesional melalui organisasi dan langsung melayani.

“Semoga dari *workshop* ini akan dihasilkan terobosan-terobosan, dan bertambah ilmu pengetahuan, sehingga memperkuat TPK di lapangan,” harap Lalu.

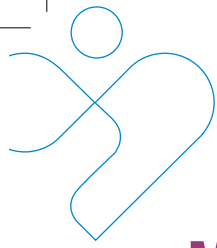
Sejalan dengan Lalu, mewakili Pj Gubernur NTB, Asisten Daerah bidang Administrasi Umum H. Wirawan, S.Si., MT, juga berharap dari *workshop* ini nantinya calon pengantin mendapatkan pendampingan sehingga tidak terjadi pernikahan dini yang mengakibatkan tingginya angka *stunting*. Dirinya menyebutkan, di Provinsi NTB terdapat program Posyandu Keluarga.

“Sebagai pusat informasi yang menyosialisasikan, mendampingi, dan mengedukasi masyarakat terhadap pencegahan *stunting*. Juga diluncurkan ‘Jumat Salam’ dimana seluruh pejabat daerah turun ke 1.146 desa dan kelurahan untuk memantau implementasi penurunan *stunting* dan angka kemiskinan. Kita akan bertambah kuat jika selalu berkolaborasi,” ujarnya.

Berperan sebagai narasumber, pemateri dari BKKBN, Kemenkes, Kemendes, Kemendagri, Kemensos, Kemenag, IBI, PKK, Tenaga Ahli Setwapres, Ditlila, serta Tim Demi Kita yang mana menyampaikan materi selama kegiatan *workshop*. Adapun materi yang diberikan yaitu seputar kebijakan strategi percepatan penurunan *stunting* (PPS), mekanisme kerja TPK, pendampingan calon pengantin, platform video edukasi, komunikasi amtar pribadi, serta strategi komunikasi dalam upaya PPS.

Diketahui, *workshop* serupa juga telah diselenggarakan untuk 3 regional lain yaitu regional Sumatera, Sulawesi, Kalimantan pada 22 - 29 Oktober 2023, serta regional Jawa-Bali pada 29 Oktober - 5 November 2023.

Editor: Kristianto



# Menikah Muda Berpotensi Lahirkan Anak *Stunting*

■ Penulis: Andi Munandar Anwar

**SELAYAR, BKKBN** – Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham, mengatakan *stunting* menjadi ancaman Indonesia dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Jika tidak diturunkan saat ini, *stunting* akan mempengaruhi kualitas generasi bangsa di masa mendatang.

Untuk itu, Aliyah menekankan perlunya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan *stunting* melalui pencegahan, baik yang berkaitan dengan faktor sensitif maupun spesifik. “Salah satu penyebab *stunting* adalah pernikahan dini, di mana anak yang menikah di usia muda, baik secara mental maupun fisik berpotensi melahirkan anak *stunting*. Ditambah lagi jika ekonomi keluarga belum siap, nantinya akan sulit bagi pasangan muda ini memenuhi kebutuhan gizi pertumbuhan dan perkembang anaknya,” sebut Aliyah.

Hal itu ditegaskan Aliyah pada gelaran kegiatan Kampanye Program Percepatan Penurunan *Stunting* bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI, Rabu (18/10/23). Bertempat di Hotel Tanjung Merayu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan ini diikuti 350 peserta, terdiri dari camat, lurah, kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan se-Kabupaten Selayar.

Aliyah mendorong agar setiap remaja memperhatikan usia ideal menikah, dimana perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. “Di usia ini pasangan telah siap secara mental dan fisik untuk menjadi orang tua, siap hamil dan melahirkan, serta bisa merawat dan memberikan gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak secara baik dan benar,” ujar Aliyah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Shodiqin, S.H., M.M menyampaikan terbitnya Perpres nomor 72 tahun 2023 mengamanatkan BKKBN sebagai koordinator Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia. “Data SSGI Tahun 2022 angka prevalensi *stunting* Sulawesi Selatan 27,2 persen. Angka ini masih di atas nasional yaitu 21,6 persen. Sedangkan batas standar angka *stunting* suatu negara yang ditetapkan WHO adalah 20 persen,” tutur Shodiqin.

Menurut Shodiqin, menurunkan *stunting* menjadi tugas bersama. “Untuk mempercepat penurunannya, BKKBN tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dan komitmen berbagai pihak. Lewat koordinasi dan konvergensi yang terbangun, kita berharap target 14 persen *stunting* di 2024 bisa kita capai,” ujar Shodiqin.

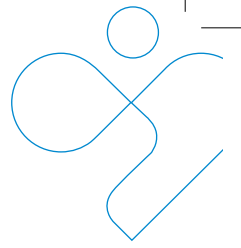
Shodiqin menyebutkan strategi penurunan *stunting* yang dilakukan BKKBN yaitu pencegahan lahirnya *stunting* baru. Caranya, dengan melakukan pendampingan kepada kelompok berisiko *stunting*, yaitu remaja sebagai calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan baduta. “Kunci penurunan *stunting* adalah pencegahan lahirnya *stunting* baru. Untuk itu, BKKBN melalui perannya terus mendorong agar setiap Pasangan Usia Subur mengatur kelahiran anak dengan ber-KB,” sebut Shodiqin.

Dalam kegiatan ini diserahkan alat antropometri kit kepada 14 Puskesmas dengan sasaran 309 Posyandu se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Bantuan ini merupakan yang terbanyak di Sulawesi Selatan dengan harapan dapat mendorong upaya percepatan penurunan *stunting*.

Editor: Santjojo Rahardjo



Penyerahan alat antropometri kit kepada 14 puskesmas dengan sasaran 309 posyandu se-Kabupaten Kepulauan Selayar.



# Entaskan *Stunting* di Riau, BKKBN *Launching* Si Peti Keris

■ Penulis: Tresnawati

**PEKANBARU, BKKBN** – Bertempat di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (7/11/2023), Perwakilan BKKBN Riau meluncurkan sebuah inovasi yang dinamakan Si Peti Keris, sebuah akronim dari ‘Strategi Pemantauan Intervensi Keluarga Berisiko Stunting Yang Terintegrasi’.

Hadir pada *launching* tersebut, Plt. Gubernur Riau yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setda P Riau, M. Job Kurniawan, Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Forkopimda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Kepala DP3AP2KB Provinsi Riau serta beberapa ketua organisasi dan akademisi di lingkungan Provinsi Riau.

Si Peti Keris hadir dalam menjawab permasalahan masih tingginya angka *stunting* di Provinsi Riau dan belum tersedianya data ‘*by name by address*’ keluarga berisiko *stunting* yang akan dan sudah mendapatkan intervensi. Sehingga kadangkala intervensi yang diberikan tidak tepat sasaran, bahkan tidak terpantau dengan baik.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi *stunting* di Provinsi Riau berada pada angka 17 persen, lebih baik dibanding tahun 2021 sebesar 22,3 persen. Masih tersisa waktu beberapa bulan ke depan agar prevalensi *stunting* di Riau turun menjadi 14 persen di 2024 sesuai target yang ditetapkan Presiden RI.

Sebuah inovasi yang di kemas dalam bentuk *dashboard* ini akan memantau keluarga berisiko *stunting* untuk mendapatkan intervensi secara tepat sasaran. Si Peti Keris menyajikan data yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. *Dashboard* ini diinput melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang didapatkan dari hasil pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga dan Verifikasi dan Validasi Keluarga Berisiko *Stunting* setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam aplikasi *sigabkkbn.go.id*.

Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si sebagai inisiator Si Peti Keris berharap inovasi ini dapat mendukung pemerintah dalam menentukan kebijakan pencegahan dan penurunan *stunting* di Riau.

Mardalena juga menambahkan, bahwa pencegahan dan pengentasan *stunting* haruslah tepat sasaran, dengan tersedianya data *by name by address* sehingga siapa dan



Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si saat *launching* program inovasi berbasis teknologi bernama Si Peti Keris.

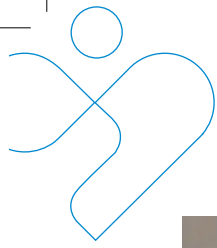
dimana sasaran berada menjadi jelas.

“Dengan begitu saya yakin *stunting* di Riau bisa turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Bahkan mungkin bisa lebih rendah dari angka tersebut,” ujarnya optimis.

Lebih jauh Mardalena menyampaikan beberapa manfaat dari inovasi Si Peti Keris. Bahwa Si Peti Keris akan memberikan kemudahan dalam pemanfaatan data dan informasi keluarga; membantu dalam penyusunan strategi dalam intervensi keluarga berisiko *stunting* sesuai permasalahan yang dihadapi keluarga; serta dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan pendampingan keluarga berisiko *stunting* secara efektif dan efisien.

“Setelah kegiatan *launching* Si Peti Keris ini, kami akan melaksanakan sosialisasi di 12 Kabupaten/Kota sehingga Si Peti Keris dapat dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau,” ujar Mardalena di hadapan bupati/walikota yang hadir pada pertemuan tersebut.

Editor: Santjojo Rahardjo



Peserta Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan *Stunting* bersama Kementerian/ Lembaga di Hotel Vasa, Surabaya, Senin.

## Terjadi Akibat Faktor Multi Dimensi Jatim Perlu Usaha Keras Capai Target 14%

■ Penulis: Devi

**SURABAYA, BKKBN** – Upaya penurunan *stunting* tidak berakhir pada 2024. Karena *stunting* dijadikan salah satu indikator pembangunan kesehatan di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Pada 2045, prevalensi *stunting* pada balita di Indonesia ditargetkan mencapai 5 persen.

Hal itu dikatakan Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas saat mengawali pertemuan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan *Stunting* bersama Kementerian/ Lembaga yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan 12 provinsi prioritas khusus, bertempat di Hotel Vasa, Surabaya, Senin (16/10/2023).

Bahjuri Ali melanjutkan, prevalensi *stunting* di Indonesia turun 2,8 persen dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Sementara target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 prevalensi *stunting* turun ke 18,4 persen belum tercapai. Sementara RKP tahun 2023 adalah 17,5 persen.

“Untuk mencapai target RPJMN tahun 2024 prevalensi *stunting* 14 persen diperlukan penurunan paling tidak 3,8 persen per tahun,” ujarnya.

“Progress Penurunan Prevalensi *Stunting* untuk 12 Provinsi Prioritas, Jawa Timur termasuk daerah dengan penurunan terbesar,” imbuh Bahjuri Ali.

Sementara itu, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur, Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur pada kesempatan itu mengatakan, menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* di Jawa Timur mengalami penurunan dari 23,5

persen pada 2021 menjadi 19,2 persen tahun 2022.

Dari 38 wilayah kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur, sejumlah 24 kabupaten/kota mengalami penurunan. Di lain pihak 14 lainnya mengalami kenaikan prevalensi *stunting*. “Melihat data proyeksi *stunting* Provinsi Jawa Timur, bila tahun 2022 angka prevalensinya 20,88 persen, maka prevalensi *stunting* di Jawa Timur tahun 2023 diproyeksikan di angka 17,9 persen, kemudian di tahun 2024 menjadi 14,92 persen. Artinya, kita perlu usaha lebih keras untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024,” urai Liswati.

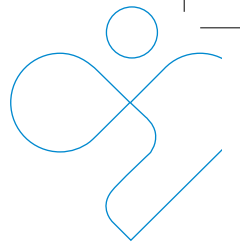
Dengan prevalensi 14,92 persen, menurut Liswati, masih sekitar 500 ribu balita di Jawa Timur yang mengalami *stunting*.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M menjelaskan bahwa *stunting* disebabkan karena faktor multidimensi. Mulai dari asupan gizi yang kurang hingga pola asuh yang kurang tepat dan lingkungan yang tidak sehat.

Kegiatan evaluasi ini digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di lokus 12 provinsi prioritas *stunting* yakni, Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB dan NTT ditambah Papua dan Papua Barat.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Deputi Bidang Pembangunan Manusia Bappenas, Amich Alhumamih, Ph.D.

Editor: Santjojo Rahardjo



# TNI, *Stunting* dan Keluarga Berencana

■ Penulis: IG Rukmana

**MAKASSAR, BKKBN** – Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, penanganan *stunting* menjadi masalah serius yang mulai ditangani pemerintah. Jadilah *stunting* sebagai program prioritas nasional yang harus segera diatasi.

*Stunting* harus segera diatasi, lantaran *stunting* sangat mengganggu upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang seimbang demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Salah satu mitra kerja strategis yang ikut berperan aktif dalam program percepatan penurunan *stunting* hingga penjuror negeri adalah TNI. Peran serta TNI dalam program ini dinilai BKKBN sangat strategis.

Selain memiliki personil yang menyebar hingga di wilayah terluar dan perbatasan, sarana dan prasarana yang dimiliki TNI sangat mendukung program yang diemban BKKBN.

Keseriusan TNI dalam hal ini ditunjukkan dengan kesediaan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M, dikukuhkan menjadi Duta Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS).

Jenderal Dudung menjadi pelopor bagi para prajurit TNI-AD untuk ramai-ramai berpartisipasi aktif membantu percepatan penurunan *stunting* di seluruh wilayah Indonesia. Langkah nyata dari komitmen itu diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan makanan tambahan bergizi kepada keluarga risiko *stunting*. Dilakukan serentak di masing-masing Kodam hingga Koramil.

TNI juga menggalakan dan sekaligus mengajak masyarakat menjadi akseptor Keluarga Berencana (KB). KB diyakini menjadi salah satu program jitu dalam upaya pencegahan *stunting* sejak dari hulu sehingga tidak muncul 'new *stunting*'.

Karenanya, TNI pun tak segan ikut membuka layanan KB di pusat-pusat fasilitas kesehatan (faskes), baik rumah sakit hingga pun poliklinik TNI.

Dalam momentum Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2023, yang puncak peringatannya di Indonesia digelar pada 23 Oktober 2023 di Kota Cimahi, Jawa Barat, faskes TNI-AD ikut andil dalam pelayanan KB. Salah satunya di



Kegiatan Pekan Pelayanan KB di faskes poliklinik kesehatan Bulukumba Kesehatan Daerah Militer XIV/Hasanuddin dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia 2023.

faskes poliklinik kesehatan Bulukumba Kesehatan Daerah Militer XIV/Hasanuddin.

Pelayanan KB ini dilakukan dalam Pekan Pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia, diadakan dari 26 September 2023 hingga 4 Oktober 2023. Pelayanan KB yang dilakukan di poliklinik Kesdam Bulukumba menjangkau 807 akseptor, yang di antaranya sebanyak 289 akseptor ber-KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

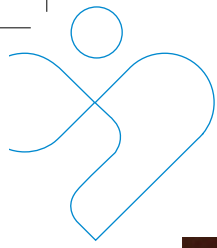
Dari perolehan tersebut, pada momen peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2023, poliklinik Kesdam Bulukumba meraih penghargaan sebagai Juara Tiga Fasyankes TNI-AD dengan Pelayanan KB Terbanyak yaitu 807 akseptor.

Poliklinik ini juga meraih Juara Tiga Pelayanan KB Kategori Umum untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Sebanyak 289 akseptor telah mendapat pelayanan.

Penghargaan diserahkan masing-masing oleh Kepala BKKBN RI Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), dan Kepala Pusat Kesehatan TNI-AD (Kapuskesad) Mayor Jenderal TNI Dr. dr. Sukirman, Sp.KK, M.Kes FINSDV., FAADV.

Dengan peran aktif TNI diharapkan program percepatan penurunan *stunting* dan pelayanan KB mendulang sukses. Sehingga sumber daya manusia yang berkualitas dapat terwujud. Dan cita-cita Generasi Emas Indonesia 2045 tercapai.

Editor: Santjojo Rahardjo



Focus Group Discussion yang digelar Markas Besar TNI dengan tema Peran TNI Guna Mendukung Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting dalam rangka mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, dan Produktif.

## BKKBN: Hanya Tinggal 10 Bulan untuk Kejar Target *Stunting* 14 Persen

■ Penulis: Kristianto

**JAKARTA, BKKBN** – Waktu yang dibutuhkan untuk mengejar target prevalensi *stunting* 14 persen tinggal 10 bulan lagi.

“Butuh upaya maksimal untuk mengejar target prevalensi *stunting* 14 persen. Waktunya, kalau kita hitung tinggal 10 bulan lagi,” kata Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso di Markas Besar TNI di Cilangkap, Kamis (19/10/2023).

“Tahun 2024 tidak berarti 12 bulan. Tetapi ini tidak kurang dari 10 bulan. Bulan ini (Oktober 2023), hitungan waktu untuk mengejar target 14 persen tinggal 10 bulan lagi. Karena bulan Agustus 2024, Tim Survei sudah mulai mendata prevalensi *stunting*. Jadi waktunya hanya tinggal 10 bulan lagi,” kata Teguh.

Karena itu Teguh mengajak semua pihak untuk bekerja keras dan membuat terobosan-terobosan dalam menurunkan *stunting*.

Pernyataan Teguh itu disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang digelar Markas Besar (Mabes) TNI dengan tema Peran TNI Guna Mendukung Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* dalam rangka mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, dan Produktif.

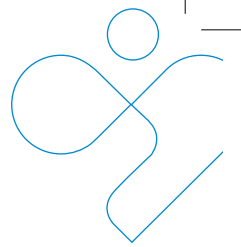
Menurut Teguh, berdasarkan data empiris, prevalensi *stunting* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren menurun.

Data yang dikeluarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesda), menunjukkan pada 2007 angka prevalensi *stunting* sebesar 36,8 persen. Prevalensi sempat naik pada 2013 menjadi 37,2 persen. Sejak 2018 angkanya menunjukkan tren menurun yakni 30,8 persen (2018), 27,7 persen (2019), 24,4 persen (2021), dan 21,6 persen (2022).

“Kita bersyukur ikhtiar pemerintah sudah banyak dilakukan. Tren prevalensi *stunting* terus turun. Tahun 2023 ini kita targetkan turun 3,8 poin jadi 17,8 persen,” kata Teguh.

Karena itu Teguh mengatakan BKKBN optimistis





target prevalensi *stunting* 14 persen pada 2024 dapat dicapai.

Lebih jauh Teguh mengatakan ada 71 juta entitas keluarga di seluruh Indonesia dari hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,5 juta keluarga berisiko *stunting*.

Menurut Teguh, dari jumlah keluarga berisiko *stunting* itu, ada tiga sasaran prioritas yakni pertama calon pengantin sebagai pencegahan preconsepsi; Kedua, sasaran kepada ibu hamil. Ketiga, sasaran kepada ibu pascasalin dan anak usia 0 - 23 bulan.

Teguh juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang turut berperan serta melalui upaya nyata menurunkan *stunting*.

Sementara itu FGD yang dibuka Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M juga membahas Peran TNI dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah.

Dalam arahnya, Letjen TNI Bambang Ismawan mengatakan FGD harus menghasilkan upaya nyata dan bermanfaat bagi sesama.

“Hasil FGD ini harus bisa dilaksanakan di lapangan. Mungkin antar daerah bisa berbeda pelaksanaannya. Karena itu perlu koordinasi antar daerah,” kata Letjen. Bambang Ismawan didampingi Koorsahli Panglima TNI Laksda Dwi Sulaksono.

Selanjutnya, Letjen. Bambang mengatakan hasil FGD



Deputi Bidang Adpin BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dan Irjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsji Tohir hadir dalam FGD di Mabes TNI.

akan dimonitor. “Supaya peran nyata TNI dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tegas dia.

FGD yang dipandu presenter Tysa Novenny di Aula Gatot Soebroto dihadiri ratusan perwira tinggi dan menengah TNI dari tiga matra, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Acara ini juga diikuti secara daring dari Kodam, Lanal, dan Lanud dari seluruh Indonesia.

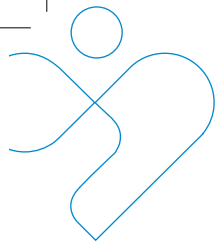
FGD juga menghadirkan narasumber yakni Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsji Tohir yang memaparkan materi tentang pengendalian inflasi daerah.

Hadir juga sebagai narasumber Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Lovely Daisy, Direktur Tanaman pada Kementan Andi M. Idil Fitri.

Editor: Fimela Apriany



Focus Group Discussion yang digelar Markas Besar TNI dengan tema Peran TNI Guna Mendukung Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*.



# Konferensi Internasional PPD di Zimbabwe Soroti Tiga Isu Utama Kependudukan Dunia



Deputi Bidang ADPIN BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd bertemu dengan Presiden Zimbabwe pada Pertemuan Dewan Tahunan ke-20 PPD dan Konferensi Internasional Antar Kementerian Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan di Victoria Falls, Zimbabwe.

■ Penulis: Rizky Fauzia

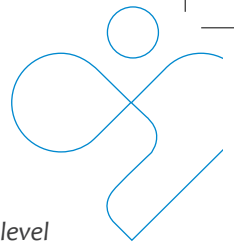
**HARARE, BKKBN** – Pertemuan Dewan Tahunan ke-20 *Partners in Population and Development* (PPD) dan Konferensi Internasional Antar Kementerian Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan yang digelar di Victoria Falls, Zimbabwe, menyoroti tiga isu utama permasalahan kependudukan dunia.

Dalam pertemuan yang digelar 8 hingga 11 Oktober itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berbagi praktik baik tentang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi kepada 27 negara anggota PPD.

“Sekarang ini ada tiga fokus utama yang menjadi perjuangan PPD, yang nantinya ini untuk menjamin program-program prioritas ICPD. Ada yang disebut tiga zeros. Pertama bagaimana mengeliminasi masalah *mortality rate*, angka kematian ibu melahirkan masih

tinggi di 27 negara-negara tadi. Kemudian *unmet need* pasangan usia subur yang seharusnya membutuhkan pelayanan KB tetapi tidak terlayani dengan baik. Ketiga tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk praktik-praktik kekerasan pada anak,” kata Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd melalui telewicara kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/03/2023).

Teguh yang didampingi Kepala Pusat Pelatihan, Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB (Pulin) BKKBN Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA. Ini mewakili Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam *International Inter-Ministerial Conference on South-South and Triangular Cooperation in Population and Development: A High-Level Consultation Leading up to ICPD30* digelar tanggal 8 - 11 Oktober 2023 di The Elephant



Hills Hotel and Resort, Victoria Falls, Zimbabwe.

“Sesuatu yang perlu kita catat adalah perjuangan *zero population growth* ujungnya adalah memang 2,1 TFR nya dan sekarang sudah berhasil. Artinya sekarang sudah berhasil Indonesia tetapi jangan sampai masuk ke *zero growth* seperti negara Jepang dan negara lain yang sudah maju. Tetapi kita tetap harus ada kelahiran dan pertumbuhan, tapi harus dikelola dengan baik agar daya dukung dan tampung lingkungan itu bisa menjadikan populasi penduduk yang hidup di lingkungan tersebut punya kualitas yang baik. Itu maka tantangannya adalah kualitas hidup. Nah maka dari itu *stunting* masih jadi program yang kita perjuangkan,” kata Teguh yang sebelum wawancara berlangsung melakukan pembicaraan bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Zimbabwe Dewa Made Juniarta Sastrawan.

Teguh optimistis Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo menjadi *leading* dalam aspek pengelolaan kependudukan di tingkat dunia. Bahkan Indonesia telah mendapatkan penghargaan *Population Award* pada tahun 2022 lalu.

Praktik-praktik baik yang dipaparkan dalam konferensi ini mendapat sambutan baik dari 27 negara yang menjadi bagian dari organisasi Internasional *Partners in Population and Development* (PPD).

Beberapa praktik baik yang sudah diadopsi oleh negara lain, adalah pelayanan KB pasca persalinan dan keguguran, kemudian juga *religious leader on Family Planning* di beberapa kota, dan termasuk kampung keluarga berkualitas yang saat ini jadi perhatian negara-negara lain. Ia juga tak menampik akan ada kerjasama lanjutan dengan negara-negara lain dalam pelatihan-pelatihan di negara lain dimana BKKBN akan menjadi *leading* sektornya.

“Tentu dari hasil konferensi tingkat menteri *high level* ini bisa selesai dan rumusan-rumusan ini bisa dilaksanakan kebijakannya lalu muncul evaluasi menuju ICPD 30 di New York nanti. Harapannya PPD ini menjadi daya ungkit yang signifikan bagi negara-negara di dalamnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah disepakati di ICPD tahun 1994 di Cairo,” ujar Teguh.

Partners in Population and Development (PPD) merupakan sebuah *Inter-Governmental Organization* yang dibentuk untuk tujuan memperluas dan meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan di bidang kesehatan reproduksi, kependudukan, dan pembangunan.

PPD terdiri dari 27 negara anggota yang terbentuk atas prakarsa diantara pemerintah di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memiliki semangat bersama untuk memperluas dan meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Indonesia adalah salah satu negara prakarsa terbentuknya PPD yang didirikan pada tahun 1995 dan BKKBN sebagai *vocal point*. Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) merupakan PPD Board dan Exco Indonesia.

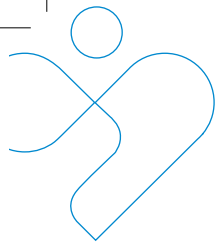
Pada tahun 2020, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 9 *Executive Committee* PPD/Dewan Eksekutif PPD periode 2021 - 2023. BKKBN dipilih oleh negara-negara anggota PPD sebagai *Treasurer*/Keuangan saat pertemuan *The 25<sup>th</sup> PPD Annual Board Meeting* tanggal 16 Oktober 2020.

Komite Eksekutif periode 2021 - 2023 terdiri dari 9 negara: Afrika Selatan (Ketua), Cina (Wakil Ketua), Sekretaris (Tunisia), Bendahara (Indonesia), India (Anggota), Benin (Anggota), Kenya (Anggota), dan Meksiko (Anggota).

Editor: Kristianto



Deputi Bidang ADPIN BKKBN Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd telewicara kepada wartawan di Jakarta saat Pertemuan Dewan Tahunan ke-20 PPD dan Konferensi Internasional Antar Kementerian Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan di Victoria Falls, Zimbabwe.



# BKKBN - RS Akademik UGM Jalin Kerja Sama Teknis Medis Pelayanan Kontrasepsi



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) bersama Dirut RS Akademik UGM Dr. dr. Darwito, SH, Sp.B (K) Onk menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Kantor BKKBN Pusat.

■ Penulis: Rizky Fauzia

**JAKARTA, BKKBN** – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktur Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada (RSA UGM) pada Selasa (24/10/2023) di Ruang NKKBS, Kantor BKKBN Pusat.

Isi Perjanjian Kerja Sama tersebut tentang sinergitas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

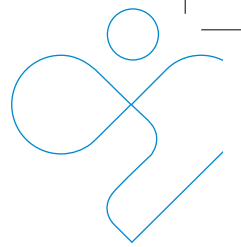
Dokter Hasto menyebutkan diantaranya adalah yang terkait teknis medis yaitu pelayanan kontrasepsi, audit kasus *stunting*, dan *Training of Trainer*.

“Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam

kerjasama diantaranya yang teknis medis adalah pelayanan kontrasepsi dan di Jogja terkenal sekolah banyak mahasiswa baik negeri maupun swasta yang bisa dipakai dalam tanda petik sebagai sasaran untuk kegiatan namun bersifat positif,” kata dokter Hasto.

“Karena memang saling membutuhkan jadi banyak mahasiswa di Jogja ini yang butuh bisa pasang susuk, IUD, tapi kenyataannya lulus belum pernah pasang susuk belum pernah pasang IUD,” jelas dokter Hasto dalam sambutannya setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut.

“Kemudian yang kedua adalah ada kegiatan audit kasus *stunting*. Jadi yang juga di rumah Sakit Akademik tentu ahlinya, disana ada ahli tumbuh kembang, ahli



obgyn, ahli anak, ahli psikologi, ahli psikiater itu ada. Sedangkan di Yogyakarta dan Jawa Tengah ini kan memerlukan audit kasus *stunting* secara periodik dan terus menerus pendampingan kasus *stunting*,” ujarnya.

Menurut dokter Hasto, BKKBN membutuhkan pelatihan-pelatihan yang tidak hanya masalah teknis medis tapi juga masalah-masalah KIE.

“Jadi pelatihan bagaimana Tim Pendamping Keluarga (TPK) itu bisa dilatih untuk bisa melakukan edukasi dengan baik ini juga butuh pengakuan dan sertifikasi dari para lembaga yang terakreditasi dan kami menyambut baik di Rumah Sakit Akademik ini sudah terakreditasi A. Jadi kalau kemarin dulu kita melatih bidan itu tertatih-tatih dengan uang yang besar tapi hanya bisa melatih sedikit gitu karena harus mengikuti aturan dari Kemenkes sehingga harus ke Bapelkes (Badan Pelatihan Kesehatan) itu,” ungkapnya

Tak hanya dalam negeri tapi juga pelatihan-pelatihan program Bangsa Kencana internasional seperti dari negara-negara Afrika yang sering berkunjung ke Indonesia dan kerjasama *South South Collaboration* tentang KIE dan peran tokoh-tokoh agama.

Dokter Hasto berharap ke depan dengan adanya kerjasama ini bisa segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis agar pada Januari 2024 mendatang pelatihan sudah bisa dilaksanakan.

Sementara itu Direktur Utama Rumah Sakit Akademik UGM Dr. dr. Darwito, S.H., Sp. B (K) Onk menyambut baik penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

“Momen yang sangat membanggakan penandatanganan PKS apa yang menjadi fakta bersama sesuai

dengan program-program pemerintah dalam hal ini BKKBN, Rumah Sakit Akademik UGM siap untuk menjadi mitra. Prinsip kami adalah kita maju bersama dalam RSA UGM pilihan yang tidak keliru karena RSA UGM adalah rumah sakit pendidikan, sekarang adalah rumah sakit pendidikan utama dari FKMK (Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan) UGM bagian dari rumah sakitnya adalah Rumah Sakit UGM dan juga akreditasi diklatnya adalah A dari kemenkes,” ujar Darwito.

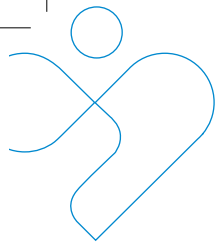
“Sehingga nanti *insya Allah* harapan kita semuanya untuk program penanganan program *stunting* dan yang lain program-program BKKBN *insya Allah* kami akan bersinergi. Terima kasih sekali dokter Hasto selaku Kepala BKKBN yang telah memberikan kesempatan untuk menggunakan RSA sebagai mitra,” ujar dia.

Sedangkan ruang lingkup yang tertulis di dalam Perjanjian Kerjasama BKKBN dengan RSA UGM adalah Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Sosialisasi melalui pengembangan modul Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting*; pelatihan, *Training Of Trainers* dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan dan tenaga lapangan; pemanfaatan data dan informasi terkait Program Bangsa Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan pelayanan dan rujukan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta tindak lanjut audit kasus *Stunting*.

Editor: Kristianto



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BKKBN dengan Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada (RSA UGM).



# Refleksi 88 Tahun GPM Kolaborasi Bersama BKKBN dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Maluku

■ Penulis: Krisna Soselisa

**BKKBN** – Gereja Protestan Maluku (GPM) merupakan salah satu gereja di Indonesia yang beraliran Protestan Reformasi atau Calvinis. GPM berdiri di Ambon, Maluku, pada 6 September 1935. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari kelahiran GPM dan memandirikan dirinya dari Gereja Protestan di Indonesia (GPI) atau *Indische Kerk* sebagai bentuk kemandirian gereja.

Gereja Protestan Maluku atau GPM adalah gereja Protestan yang melayani di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. GPM bertumbuh dengan berbagai tantangan yang bukannya membuat umat Kristen di provinsi kepulauan ini mundur, tetapi membuat semangat kekristenan makin menyala-nyala.

Di masa sekarang GPM dipimpin Hamba Tuhan MPH SINODE Ketua Umum Pdt. Elifas Tomix Maspaitella, M.Si dan Sekretaris Umum Pdt. S.I. Sapulette. Di usianya yang memasuki 88 tahun, GPM juga bertransformasi dalam peranan membangun keluarga Kristen yang matang dalam perencanaan untuk kehidupan dan juga berperan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Maluku.

## Peranan GPM dalam Penurunan *Stunting*

Kolaborasi dalam Percepatan Penurunan *Stunting* dimulai pada Januari 2022 ketika Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, kala itu Sarles Brabar, melakukan audiensi ke Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), di Kantor Sinode GPM Ambon. Sarles Brabar diterima langsung Ketua Umum MPH Sinode GPM Pdt. Elifas Tomix Maspaitella.

Audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pembaharuan Kesepahaman Bersama antara BKKBN Maluku dengan MPH Sinode GPM dalam mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Keluarga GPM. Pertemuan tersebut diakhiri dengan pemberian plakat sebagai cinderamata atas kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di Kantor MPH Sinode GPM.

Kolaborasi antara BKKBN dan GPM dipertegas dengan



Panatua Dr. Betty A. Sahertian L, M. Kes, Anggota Majelis Pekerja Harian Sinode GPM memberikan bantuan kepada Keluarga Berisiko *Stunting* di Jemaat GPM Manusa.

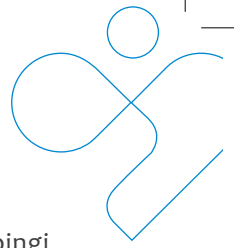
penandatanganan kerja sama (MoU) antara Perwakilan BKKBN Maluku dengan Sinode GPM, dilaksanakan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana Provinsi Maluku tahun 2022, pada akhir Maret 2022 lalu.

Tujuannya, agar Sinode GPM secara bersama dengan BKKBN bergerak dalam upaya mengurangi/menurunkan angka *stunting* di Maluku, melalui peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga warga gereja.

Untuk itu, kata Ketua MPH Sinode GPM, GPM akan menyusun program-program implementasi bersama-sama dengan BKKBN. Salah satunya adalah melalui persiapan pasangan-pasangan yang akan menikah/calon pengantin (Catin). “Jadi, melalui pengembalaan pra nikah di jemaat-jemaat kita, yang akan melibatkan juga staf BKKBN. Juga program peningkatan kualitas ekonomi keluarga, terutama di pedesaan baik pada daerah pedalaman maupun pelosok. Daerah pulau-pulau itulah persoalan kita di situ,” ulas Maspaitella.

## Kerja Sama dengan Klasis GPM Pulau Ambon Utara

Dalam rangka Keroyok Kampung *Stunting* (Kepung *Stunting*), Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Klasis GPM Pulau Ambon Utara. Penandatanganan PKS dilaksanakan di sela-sela kegiatan



Penguatan dan Fasilitasi Pokja Advokasi Program Bangga Kencana dalam Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan *Stunting* Tahun 2022, bertempat di lantai dua Kantor Klasis Pulau Ambon Utara, Kamis (30/6/2022).

Hal tersebut sebagai wujud implementasi dari MoU/Kesepakatan Bersama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM.

Salah satu strategi percepatan penurunan *stunting* adalah melalui kerja sama dengan Klasis GPM Pulau Ambon Utara yang mempunyai Jemaat Mitra di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Bersama BKKBN kolaborasi dikembangkan dalam kegiatan pendampingan bagi masyarakat atau umat/jemaat di wilayah tersebut.

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari MoU/Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tanggal 30 Maret 2022 tentang Penguatan Ketahanan Keluarga Kristen melalui program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Klasis GPM Pulau Ambon Utara merupakan Klasis yang pertama menindaklanjuti MoU tersebut yang diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kegiatan implementasi yang dikembangkan Sinode GPM ditandai juga ketika Perwakilan BKKBN mengadakan kunjungan untuk melakukan sosialisasi pencegahan *stunting* dengan sasaran Jemaat GPM Negeri Lama dan Kring PI Makedonia Klasis Pulau Ambon Utara.

Kegiatan ini berlangsung di Dusun Maneo Rendah, Desa Maneo, Kecamatan Seram Utara Kobi Timur, Kabupaten Maluku Tengah pada Oktober 2022 lalu. Adapun kegiatan penyuluhan yang dilakukan BKKBN bertujuan memberikan edukasi dalam upaya menurunkan angka *stunting* di desa terpencil tersebut.

Dusun Maneo Rendah yang berjarak 15 km dari negeri induk yakni Negeri Maneo, dihuni 52 KK, merupakan daerah terpencil dan sangat membutuhkan perhatian serius pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Karena tidak tersedianya akses jalan menyebabkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak berjalan dengan baik, otomatis angka *stunting* di Maneo Rendah cukup tinggi.

Selain memberikan penyuluhan, Perwakilan BKKBN Maluku juga berkesempatan memberikan bantuan berupa satu unit mesin pompa air untuk membantu kebutuhan air bersih bagi masyarakat Maneo Rendah.

Kegiatan selanjutnya dilakukan Perwakilan BKKBN Maluku bersama dengan Sinode GPM berlokasi di Desa Manusa, Kecamatan Leamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pada Sabtu - Minggu (6 - 7/5/2023) lalu.

Desa/jemaat Manusa merupakan binaan Sinode GPM, sehingga Sinode GPM turun langsung menemui masyarakat melalui program-program yang sifatnya penguatan masyarakat/jemaat dalam bidang kesehatan.

Kala itu, BKKBN Maluku diminta mendampingi karena di Desa Manusa ditemukan enam balita *stunting*. Diharapkan BKKBN mengintervensi/konvergen dalam rangka penguatan masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan penguatan terkait *stunting*.

Penatua Dr. Betty A. Sahertian L, M.Kes. Anggota Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinde GPM bersama tim hadir di Desa Manusa mewakili Ketua Sinode GPM.

Saat itu Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku yang hadir adalah Sarles Brabar, SE. M.Si sebagai kepala serta tim yang terdiri dari Perwakilan BKKBN Maluku dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tim gabungan BKKBN Maluku dengan Sinode GPM melakukan kegiatan pada hari Sabtu (6/5/2023) jam 19.00 sampai 23.00 WIT berupa Penyuluhan *Stunting* dan KB oleh BKKBN dan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi oleh Sinode GPM. Sedangkan Minggu (7/6/2023) dilakukan pelayanan KB dan kunjungan kepada keluarga *stunting*.

Masyarakat Manusa sangat antusias terhadap sosialisasi *stunting* dan KB walaupun penyuluhan KB tidak dilakukan secara rutin sehingga pengetahuan masyarakat tentang program KB masih dirasakan minim. Namun sosialisasi KB pelan-pelan dapat mengubah cara pandang masyarakat Manusa. Terbukti pada Minggu (7/5/2023) saat dilakukan pelayanan KB, banyak calon akseptor yang datang. Hasilnya, diperoleh peserta KB baru implan 2 orang, suntik 8 orang dan pil akseptornya cukup banyak.

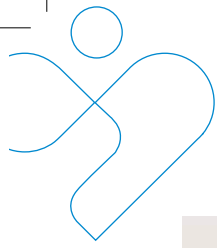
Bukan sebatas itu saja. Tim gabungan BKKBN dan Sinode GPM menyempatkan diri mengunjungi keluarga *stunting* dan keluarga yang berminat untuk ikut KB di rumah masing-masing. Tim sekaligus memberikan motivasi dan hasilnya masyarakat dapat memahami dengan baik program KB.

Letak geografis Desa Manusa dan akses jalan dengan medan yang cukup menantang membuat tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kurang aktif/berfungsi padahal sudah difasilitasi kendaraan roda dua.

Sampai hari ini BKKBN Maluku pada era kepemimpinan Dra. Renta Rego tetap intens dan konsisten menjalin koordinasi dan komunikasi dengan GPM demi memberikan perhatian kepada keluarga warga gereja di Maluku sehingga masalah *stunting* bisa teratasi.

Dalam waktu dekat ini BKKBN bersama Sinode GPM akan melakukan Kolaborasi untuk Sosialisasi Optimalisasi Aplikasi Elsimil bagi Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang merupakan warga GPM. Tujuannya, untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan keterlibatan kelompok sasaran terkait kegiatan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) dan pemanfaatan aplikasi Elsimil (siap nikah siap hamil) serta meningkatkan penerimaan manfaat akhir program gizi dan kesehatan bagi kelompok sasaran terkait konseling PMBA dan pemanfaatan Elsimil.

Editor: Santjojo Rahardjo



Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan delegasi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Negeri Pahang, Malaysia.

## Dorong Warga Punya Lebih Banyak Anak Negeri Pahang Pelajari Program Bangga Kencana di DIY

■ Penulis: FX Danarto SY

**YOGYAKARTA, BKKBN** – Angka kelahiran di Malaysia mencapai yang terendah dalam 50 tahun terakhir. Tahun 2022 angka kelahiran atau *Total Fertility Rate (TFR)* negeri itu 1,6, turun dari tahun sebelumnya 1,7. Itu artinya setiap wanita usia subur rata-rata memiliki anak rata-rata 1 sampai 2 orang.

Pemerintah Malaysia saat ini berusaha mendorong warganya untuk punya lebih banyak anak agar pertumbuhan penduduk tidak minus dan kebutuhan tenaga produktif terpenuhi. Negara Bagian Pahang dengan program Pahang Pride Kids bahkan memberikan insentif sebesar RM300 atau setara satu juta rupiah bagi setiap kelahiran bayi di wilayahnya.

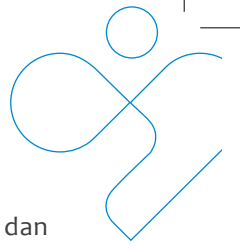
Hal tersebut terungkap dalam sambutan Dato' Sabariah binti Saidan, Pejabat Exco Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita, dan Keluarga Negeri Pahang saat mengantarkan kunjungan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Negeri Pahang ke Perwakilan BKKBN DIY, Sabtu (28/10/2023).

Tujuan lawatan ini untuk menguatkan hubungan baik yang telah terjalin selama ini antara LPPKN dengan BKKBN, dan saling tukar pengalaman serta mengetahui upaya BKKBN dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Delegasi berjumlah 15 orang tersebut diterima Kepala Perwakilan BKKBN Dra. Andi Ritamariani beserta jajarannya di Ruang Kencana. DIY dipilih sebagai tujuan tukar pengalaman karena angka kelahiran di DIY sebesar 1,89 (*Long Form SP2020*) merupakan yang terendah kedua setelah DKI Jakarta, dinilai memiliki kemiripan dengan kondisi yang terjadi di Negeri Pahang dan negeri lain di Malaysia.

Andi Ritamariani menyambut tamu negeri serumpun ini dengan memaparkan strategi BKKBN DIY dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan ketahanan keluarga di wilayah kerjanya.





Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menerima cinderamata dari delegasi LPPKN Negeri Pahang, Malaysia.

Ritamariani menyampaikan secara lengkap mulai dari upaya menyiapkan remaja merencanakan perkawinan, pengasuhan anak, remaja, dan lansia, sampai kepada penanganan *stunting*.

Dihadirkan pula perwakilan Penyuluh KB Nurwendah (PKB Bantul), Ketua Kelompok Bina Keluarga Remaja, pengurus PIK-R Kompak Yogyakarta, dan Kader Sekolah Orang Tua Hebat.

Dalam kesempatan dialog, Encik Jimbau Munggat yang mengetuai LPPKN Negeri Pahang menyampaikan ketertarikannya atas program bagi remaja, khususnya

Program GenRe yang melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) mampu menghasilkan konselor sebaya dari kalangan remaja sendiri.

Mereka ingin tahu mengapa remaja bisa antusias menjadi anggota PIK-R dan menjadi konselor sebaya. Dari tanggapan pengurus PIK-R yang dilengkapi oleh Widyaiswara Mustikaningtyas, terungkap bahwa salah satu faktor antusiasme remaja berkegiatan dalam PIK-R adalah adanya pemilihan Duta GenRe secara berjenjang sampai tingkat nasional tiap tahunnya. Duta GenRe DIY telah beberapa kali menjadi yang terbaik satu sampai tiga tingkat nasional.

Anggota delegasi awalnya heran saat diinformasikan oleh Penyuluh KB Bantul Nurwendah bahwa peserta KB Pria yang menjalani vasektomi untuk mencegah punya anak lagi justru diberi *reward* satu juta rupiah oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Sementara Negeri Pahang memberikan insentif sejumlah yang sama (RM300) bagi setiap kelahiran di Pahang.

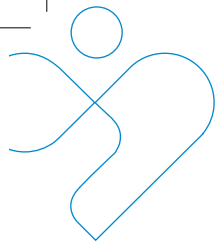
Vasektomi memang sangat kecil yang memilih menggunakannya, dan BKKBN mempromosikannya lebih kepada tujuan untuk menghindarkan kehamilan yang tidak diinginkan yang bisa membahayakan kesehatan ibu jika usianya sudah terlalu tua sekaligus potensial melahirkan anak *stunting*.

Karena sifatnya merupakan kontrasepsi permanen, maka syarat vasektomi cukup ketat, yaitu anak minimal dua dan sudah besar (tidak boleh dilakukan terhadap pria yang bersama pasangannya masih memiliki Balita), serta disetujui bersama pasangan suami istri.

Editor : Santjojo Rahardjo



Ketua LPPKN Negeri Pahang, Encik Jimbau Munggat menyatakan ketertarikannya dengan program GenRe dan PIK-R.



# Pulau Taliabu, Zahra Yolanda dan *Stunting*

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

**BKKBN** – Pulau Taliabu. Tak banyak masyarakat yang mengenal nama kabupaten ini. Pulau Taliabu memang kabupaten baru. Baru 11 tahun berdiri. Terletak di Provinsi Maluku Utara, Pulau Taliabu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula. Keberadaannya disahkan dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI.

Kabupaten Pulau Taliabu menempati sebuah pulau yang dikelilingi beberapa pulau kecil di wilayah Maluku Utara. Wilayah daratnya seluas ±738,1 km<sup>2</sup>. Secara geografis, kabupaten ini lebih mudah diakses melalui Luwuk atau Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah) dibanding dari ibukota Provinsi Maluku Utara (Ternate).

Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat pada 2019, berjumlah 59.330 jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 52.503 jiwa, atau tumbuh 0,02 persen.

Mengutip *Wikipedia.org*, penduduk yang menetap di Pulau Taliabu terdiri dari penduduk asli Taliabu yang terdiri atas Suku Mange, Suku Kadai, Suku Siboyo, dan Suku Panto. Mereka diklasifikasikan antara lain berdasarkan bahasa yang digunakan, wilayah menetap, serta orientasi mata pencaharian. Adapun penduduk pendatang yang berasal dari luar Pulau Taliabu terdiri atas Suku Buton, Suku Ambon, Suku Banggai, Suku Bugis-Makassar, dan Suku Jawa.

Kendati penduduk Taliabu terdiri dari berbagai suku dengan latar belakang budaya berbeda, namun kehidupan sosial masyarakatnya berjalan harmonis, tiada konflik sosial. Hal ini diayomi oleh kearifan lokal masyarakat Pulau Taliabu yang dikenal dengan ‘Mangkalomu’ atau kumpul bersama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang didasari dengan ‘*Dadi Sia Kito Mangkoyong*’, artinya bersatu untuk maju. Filosofi kehidupan masyarakat yang damai ini dijadikan motto oleh pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dengan istilah ‘*Hamungsia Sia Tofu*’, yang berarti Bersama dan Bersatu.

Di tengah kesibukan masyarakat dan pemerintah setempat dalam menata kehidupan, pemerintahan dan pembangunan, sosok yang satu ini menjadi pendorong kuat agar cita-cita masyarakat Pulau Taliabu bisa



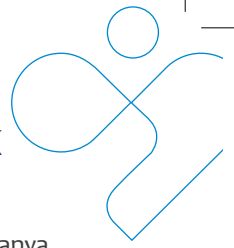
Ketua TP-PKK Pulau Taliabu, Zahra Yolanda Aliong Mus.

terwujud. Zahra Yolanda Aliong Mus, sebuah nama yang cukup dikenal masyarakat di sana.

Cantik, muda, produktif dan gesit. Sosoknya memang demikian. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulau Taliabu, alias istri Bupati Pulau Taliabu, Zahra tentu saja memiliki *power* yang cukup kuat dalam ikut mendorong dan menggerakkan perubahan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. *Power* itu kini semakin giat digunakan, salah satunya dalam program nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

## Mengayuh Semangat

Di bawah bendera TP-PKK Pulau Taliabu, Zahra mengayuh semangat dengan menghimpun komitmen dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bersama dalam gerakan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.



“Masa Ketua PKK-nya semangat, kami tidak semangat,” ungkap Zahra yang mengutip ‘sindiran’ beberapa sejawatnya. Semangat Zahra membuat semakin banyak elemen masyarakat, termasuk para pejabat, yang peduli terhadap program penanganan *stunting*. Cita-citanya, setidaknya kabupaten ini bisa memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemerintah merealisasikan target nasional prevalensi *stunting* 14 persen di 2024.

“Motor penggeraknya PKK karena organisasi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Merupakan garda terdepan dalam penanganan *stunting* karena tidak ada lagi organisasi yang mampu menjangkau satuan terkecil, yakni keluarga. Dan PKK pulalah yang kerap bergiat memberikan edukasi tentang pentingnya kesadaran membangun lingkungan yang bersih dan asri dan pencegahan pernikahan anak, yang berpotensi juga menjadi salah satu penyebab munculnya kasus *stunting* pada anak yang dilahirkan,” papar Zahra memberikan alasan mengapa ia memakai ‘kendaraan’ PKK dalam gerakan penanganan *stunting*. “Agar lebih cepat dan tepat sasaran,” jawabnya ringkas.

Anggota PKK memang menjadi salah satu kader yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tugas mereka mendampingi keluarga berisiko *stunting*. Tim bentukan pemerintah ini berjumlah 200.000 tim, beranggotakan 600.000 orang. Dalam satu tim beranggotakan tiga orang, Selain kader PKK, ada bidan dan kader KB. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok desa, termasuk juga di Pulau Taliabu.

Sedari awal Zahra menilai *stunting* merupakan persoalan yang tidak kecil, yang hanya bisa ditangani



Zahra Yolanda giat berkiprah dalam program Dashat.

dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, nyatanya dibutuhkan keterlibatan banyak pihak dan dikerjakan secara bergotong-royong. “Solusinya, membangkitkan kesadaran pada diri sendiri, dan kesadaran pentingnya lingkungan yang bersih di sekitar kita,” jelas Zahra.

#### Program Yagame

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tiada pernah lelah berupaya menurunkan prevalensi *stunting*. Dan itu dilakukan salah satunya melalui program Yagame atau Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Kata Zahra, melalui program berbasis kearifan lokal tersebut Pemkab Pulau Taliabu menunjuk sejumlah tokoh berpengaruh, baik dari kalangan anggota DPRD, Ketua Fraksi, pejabat di lingkungan Pemkab Pulau Taliabu, maupun camat wilayah setempat, untuk menjadi BAAS.

Berbicara dalam diskusi bertajuk “Nyalakan Mimpi dengan Cukup Gizi” yang digelar di *People and Place, Synthesis Huis*, Cijantung, Jakarta, beberapa waktu lalu, menurut Zahra, tugas mereka sebagai BAAS adalah mengintervensi keluarga, khususnya keluarga berisiko melahirkan anak *stunting*, untuk mendapatkan bahan makanan yang bergizi, sanitasi, dan perumahan layak huni. Tentu saja PKK ikut *backup* program tersebut.

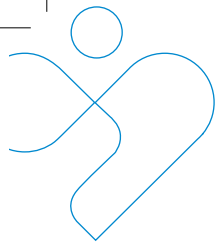
Walau hingga saat ini kabupaten tersebut belum memiliki akses penyeberangan yang nyaman, namun Pulau Taliabu justru mampu menekan angka *stunting*. Melalui intervensi kemanusiaan, mengutip data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* Kabupaten Pulau Taliabu susut bertahap. “Pada 2021, prevalensi *stunting* di wilayah kami mencapai angka 32,5 persen. Angka ini turun menjadi 23,7 persen pada 2023, atau turun 8,8 persen,” katanya dengan raut wajah sumringah.

Kepedulian Zahra sudah dimulai sejak dari hulu. Terkait antisipasi pernikahan anak, TP-PKK Kabupaten Pulau Taliabu telah mengembangkan kerja sama dengan Kementerian Agama. Melalui kerja sama ini, TP-PKK setempat dan Kemenag akan melakukan penilaian dan bimbingan nikah kepada calon pengantin (*catin*) sehingga mereka lebih siap untuk menikah.

“Kami mendorong *catin* terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Nikah atau Siap Nikah (*Elsimil*). Pasangan pengantin yang benar-benar siap nikah juga akan siap memiliki keturunan sehingga terhindar dari risiko melahirkan anak *stunting*,” tutur Zahra.

Bukan hanya itu, Zahra Yolanda juga giat berkiprah dalam program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (*Dashat*). Ia memotivasi agar pengelola *Dashat* di Kampung Keluarga Berkualitas (*Kampung KB*) di wilayahnya semakin kreatif menghasilkan menu-menu berbahan lokal dan bergizi. “Sehingga bisa bermanfaat bagi keluarga berisiko *stunting*,” harap Zahra menyudahi penjelasannya.

Editor: Annisa H



# Lincah di Usia 78 Tahun, Sukamto Tak Lelah Kampanyekan Pencegahan *Stunting*

■ Penulis: FX Danarto SY

**BKKBN** – Haji Sukamto, anggota Komisi IX DPR RI ini terlihat masih sangat lincah di usianya yang menginjak 78 tahun. Seakan tak mengenal lelah, anggota DPR RI ini rajin turun ke dapilnya untuk menyerap aspirasi sekaligus melakukan edukasi tentang berbagai kebijakan pembangunan, terutama terkait dengan bidang tugasnya di Komisi IX.

Salah satu program yang paling sering disampaikannya kepada para konstituen adalah percepatan penurunan *stunting*.

Seperti yang terjadi pada Selasa (10/10/2023) di Joglo Ndalijan yang berlokasi di Jalan Kabupaten Trihanggo Sleman, DI Yogyakarta, Sukamto hadir bersama Inspektur Utama (Irtama) BKKBN Ary Dwikora Tono dalam kegiatan Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja.

Dalam kesempatan ini Irtama BKKBN Ary Dwikora Tono mengingatkan pentingnya pencegahan *stunting* saat ini mengingat tahun 2045 bangsa ini ingin menggapai Indonesia Emas. Artinya, Indonesia yang maju dan berdaya saing.

Hal itu sulit tercapai kalau bayi dan anak-anak saat ini terpapar *stunting*. Karena merekalah yang pada 2045 nanti akan tumbuh menjadi angkatan kerja usia produktif. “Jika anak-anak saat ini banyak yang *stunting*, Indonesia Emas 2045 bisa tidak terwujud,” Ary Dwikora mengingatkan.

Hal yang selalu disampaikan Sukamto terkait pencegahan *stunting* berkisar pada menikah (dan hamil) pada usia ideal, tidak terlalu muda namun juga tidak terlalu tua. Juga pentingnya memberikan ASI kepada bayi, serta pengasuhan dan pemberian asupan gizi yang baik pada anak.

“Kalau tidak punya uang untuk membeli asupan gizi yang cukup, bilang pada saya. Minta pada saya. Minta pada anggota DPR atau DPRD. Sangat salah kalau DPRnya kenyang tapi rakyat kelaparan.” Begitu sering diungkapkannya setiap bersama BKKBN melaksanakan sosialisasi dan KIE.

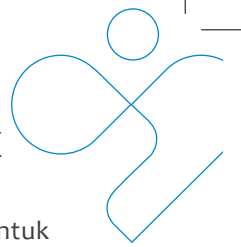
Untuk diketahui, Sukamto pernah berdinasi di

Kepolisian selama 26 tahun sebelum memutuskan untuk menekuni dunia bisnis dan politik.

Setelah meninggalkan karir sebagai polisi yang telah dimulainya sejak 1968, pada 1994 Sukamto memulai menggeluti bisnis dan sempat menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Daerah DIY



Haji Sukamto, anggota Komisi IX DPR RI



Inspektur Utama BKKBN, Ary Dwikora Tono tengah memberikan sambutan pada sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana.

periode 2009 - 2014. Ia kemudian melanjutkan karirnya dengan menekuni dunia politik dengan menjadi Wakil Ketua DPW PKB DIY pada 2014 - 2018.

Karir politiknya berlanjut dengan menjadi Ketua Komisi C DPRD DIY (2006 - 2009), Ketua Fraksi PKB DPRD DIY (2006 - 2009, 2009 - 2014, 2014 - 2019) sebelum menapak naik menjadi anggota DPR RI (2019 - sekarang), dan sempat duduk di Komisi II sebelum saat ini berada di Komisi IX. Untuk tahun 2024, pihaknya

sedang mempertimbangkan untuk mengikuti kontestasi sebagai calon kepala daerah.

Mengaku bukan ahli di bidang kesehatan, Sukanto setiap melakukan sosialisasi di Dapil DIY selalu mengajak Kepala Perwakilan BKKBN DIY untuk menemaninya memberikan pengertian tentang pentingnya pencegahan *stunting* kepada komunitas masyarakat yang ditemuinya.

Tidak terkecuali saat melakukan sosialisasi di Joglo Ndalijan, Kaper BKKBN DIY Andi Ritamariani tampak memberikan pengertian tentang pentingnya pemberian ASI secara eksklusif alias ASI saja, tanpa makanan atau minuman lainnya selama enam bulan pertama untuk mencegah *stunting*.

“Setelah enam bulan, bayi perlu diberikan makanan pendamping karena kebutuhan gizinya bertambah.

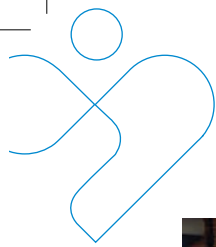
Namun ASI tetap harus diberikan sampai umur dua tahun,” terang Ritamariani.

Ditambahkannya bahwa ASI merupakan yang terbaik bagi bayi yang baru lahir. “Selain itu ASI itu ekonomis, praktis karena mudah dibawa kemana-mana dan tidak perlu disiapkan secara khusus, serta tidak akan basi,” tutup Ritamariani.

Editor: Santjojo Rahardjo



Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana yang dihadiri Haji Sukanto, anggota Komisi IX DPR RI, Inspektur Utama BKKBN, Ary Dwikora Tono dan Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani.



Kepala BKKBN, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) membuka Kegiatan Tatap Muka Pelatihan PBJP di Ruang NKKBS BKKBN Jakarta.

## Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di BKKBN Wajib Punya *Mindset* Jujur dan Sederhana

■ Penulis: Fitri Aminatul Azizah

**JAKARTA, BKKBN** – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan pelatihan kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 yang dilaksanakan secara *blended learning* pada 2 - 18 Oktober 2023, kemudian diakhiri dengan ujian sertifikasi pada 19 Oktober 2023 mendatang.

“Saya berharap *mindset*nya ditata dengan baik. Kalau kita bicara efektif dan efisien itu artinya disederhanakan, artinya *mindset* untuk menyederhanakan. Secara filosofi, dulu waktu belajar matematika di SMP, SMA itu menyederhanakan sebelum menyelesaikan soal yang sulit. Karena sederhana itu indah,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) saat membuka Kegiatan Tatap Muka Pelatihan PBJP di Ruang NKKBS BKKBN Jakarta pada Selasa (17/10/2023).

Pelatihan yang menasar peserta sebanyak 37 ASN di lingkup BKKBN ini, diselenggarakan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB (Pusdiklat KKB) bekerjasama dengan Pusat Pelatihan

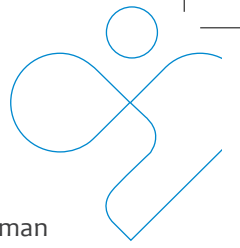
SDM PBJ dan Direktorat Sertifikasi Profesi PBJ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

PBJP merupakan mekanisme pengadaan di lingkungan pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Saat ini pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dokter Hasto mengatakan bahwa sebelum ada pelatihan secara teknis, peserta diharapkan menguasai langkah strategis dalam merencanakan kegiatan,

Yang kedua adalah *mindset* tentang kejujuran, “janganlah ada keinginan sedikitpun, *selugut pinoro sewu*, seperti lugut dibagi seribu. Jangan ada pikiran untuk mendapatkan pamrih atau sesuatu dari hal yang tidak hak,” kata dokter Hasto.

“Keterampilan itu sebetulnya belum maksimal, kalau ini berlatih tentang teknis, pelatihan mengantarkan kita pada kompetensi, harapan saya bisa di atas itu yaitu profisien. Profisien adalah kompetensi yang diulang



sedemikian rupa sehingga antara keterampilan dan diri anda itu menyatu, akhirnya bisa efisien serba cepat. Kerja hebat sudah banyak, kerja cepat sekarang jadi kunci,” lanjutnya.

Menurut dokter Hasto, rasa memiliki itu penting, “milikilah dengan sepenuh hati, BKKBN adalah *long term* rumah anda, dengan ini nanti akan muncul rasa menyanggati yang selanjutnya akan membuat kita bisa serba hemat dan efisien dalam pengadaan,” ucapnya memberikan arahan untuk peserta.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusdiklat KKB Dra. Elly Emalia, M.Pd, mengatakan guna mencapai tujuan kurikulum, pelatihan PBJP disusun dalam 30 Jam Pelajaran

materi *E-Learning* dan 18 Jam Pelajaran pendalaman materi secara tatap muka.

“Adapun dari total 48 JP tersebut, seluruh fasilitator dan narasumbernya berasal dari LKPP,” kata Elly.

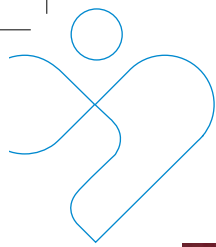
Elly berharap peserta dapat melaksanakan pengadaan yang efektif dan efisien. “Hasil yang diharapkan seluruh peserta memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kebijakan pemerintah dalam peran serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” ucapnya.

Editor: Kristianto



BKKBN menyelenggarakan pelatihan kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Level I yang dilaksanakan secara *blended learning* pada 2 - 18 Oktober 2023.





Acara Pertemuan Pakar Strategi Komunikasi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023.

## Delapan Pakar Dihadirkan **BKKBN Kembangkan Strategi Komunikasi Percepatan Penurunan *Stunting***

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

**KARAWANG, BKKBN** – Delapan pakar dari beberapa disiplin ilmu tampil sebagai narasumber dalam acara Pertemuan Pakar Strategi Komunikasi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023. Pertemuan berlangsung dari 10 - 13 Oktober 2023, bertempat di Mercure Hotel, Karawang, Jawa Barat. Dibuka oleh Plh. Deputi Advokasi, Penggerakan, Informasi (Adpin) BKKBN, Wahidah Paheng, S.Sos., M.Si.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan kementerian/ lembaga terkait. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Agama; Sekretariat Wakil Presiden; Sekretariat Kabinet; dan BKKBN.

Pertemuan pakar ini mendiskusikan paparan tentang “Strategi Komunikasi Percepatan Penurunan *Stunting*”

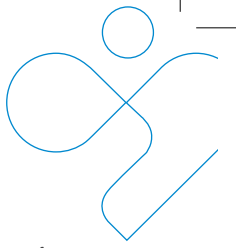
yang dibagi ke dalam Pilar 1 hingga Pilar 8, dibawakan oleh Konsultan Komunikasi/*Provetic*, Shafiq Pontoh.

Berbicara sebagai pembahas di antaranya Prof. dr. Endang L. Achadi, MPH, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dengan bahasan “Bahaya Anak *Stunting*”; Dr. dr. Riyo Kristian Utomo, M.H.Kes., CMH, Cht sebagai pakar kesehatan masyarakat (*Ayo Cegah Anak Stunting*).

Dijadwalkan hadir juga sebagai pembahas di hari ketiga Dr. Sudibyo Alimoeso, MSc, Ketua Ipadi (Menjaga Calon Pengantin); Dra. Roslina Verauli, M.Psi (Menjaga Keluarga); Prof. drh. M. Rizal Damanik, MRep.Sc., Ph.D (Menjaga Calon Ibu); dan Herry Haerudin (Menjaga Lingkungan).

Menurut Plt. Direktur KIE (Komunikasi, Informasi,





Edukasi) BKKBN, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si, dalam meningkatkan perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, strategi komunikasi yang efektif perlu dilakukan BKKBN.



Pada saat berhadapan langsung, harus ada strategi komunikasi khusus. Ketika menghadapi tentara, akan berbeda saat menghadapi kalangan perguruan tinggi ataupun masyarakat

Tujuannya, lanjut Dadi, agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama – dalam hal ini terkait *stunting*. Pada akhirnya diharapkan terjadi perubahan perilaku untuk mencegah *stunting* di masyarakat secara luas.

Bekerjasama dengan konsultan komunikasi *Provetic*, Direktorat KIE BKKBN sebagai penyelenggara berharap pertemuan pakar ini dapat mempertajam arah pesan komunikasi yang jelas dan objektif sesuai target sasaran.

Tentu saja dengan mempertimbangkan situasi yang multidimensi dan memitigasi krisis komunikasi yang mungkin terjadi.

Dalam sambutan pembukaan, Plh. Deputi Adpin BKKBN, Wahidah, S.Sos., M.Si mengatakan bahwa BKKBN membutuhkan strategi komunikasi khusus guna percepatan penurunan *stunting* yang secara nasional ditargetkan 14 persen pada 2024.

Wahidah berharap strategi komunikasi percepatan penurunan *stunting* yang dikembangkan Direktorat KIE BKKBN hendaknya mampu menyesuaikan dengan segmen-segmen yang terdapat dalam masyarakat.

“Pada saat berhadapan langsung, harus ada strategi komunikasi khusus. Ketika menghadapi tentara, akan berbeda saat menghadapi kalangan perguruan tinggi ataupun masyarakat,” ujar Wahidah.

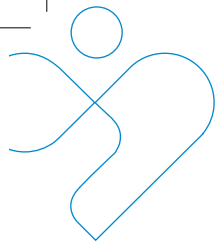
Wahidah juga memberikan contoh keluarga berisiko *stunting* tetapi mereka merasa baik-baik saja. Atau pertanyaan kenapa BKKBN diberi tugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*. Kenapa pula setelah *stunting*, BKKBN tidak melirik program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Untuk menjelaskan atau meluruskan semua itu, tentu memerlukan strategi komunikasi, yang hendaknya disesuaikan dengan segmen-segmennya,” jelas Wahidah.

Editor: Kristianto



Delapan pakar dari beberapa disiplin ilmu tampil sebagai narasumber dalam acara Pertemuan Pakar Strategi Komunikasi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023 di Mercure Hotel, Karawang, Jawa Barat.



## Prevalensi *Stunting* Naik 4,9 Persen, Komisi IX DPR-RI Kunjungi Majene



Anggota Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal berbicara pada kegiatan promosi dan KIE Percepatan Penurunan *Stunting*.

■ Penulis: Martin

**MAJENE, BKKBN** – Majene menjadi kabupaten dengan angka *stunting* tertinggi di Sulawesi Barat dengan persentase 40,6 persen pada 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi *stunting* di

kabupaten itu mengalami kenaikan 4,9 persen dibanding tahun 2021.

Melihat kondisi tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal, memilih Kabupaten Majene sebagai lokus kegiatan Promosi dan KIE Percepatan Penurunan *Stunting*, Senin (30/10/2023). Tepatnya berlokasi di Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur.

Pada kesempatan tersebut anggota DPR RI itu menyampaikan kepada masyarakat Majene bahwa berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, batas umur menikah adalah 19 tahun. Sedangkan BKKBN menghimbau agar menikah bagi perempuan pada usia 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.

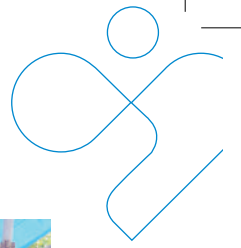
Perkawinan di usia ideal ini akan membawa Indonesia menjadi negara bebas *stunting*. “Kepada ibu hamil agar istirahat yang cukup, makan vitamin, dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan kehamilan di posyandu. Jika memungkinkan agar melakukan pemeriksaan dokter tiap bulan, demi melahirkan anak-anak yang bebas dari *stunting*,” ungkap Andi Ruskati.

Andi Ruskati juga menyampaikan bahwa bantuan telah banyak disalurkan, tapi kurang pengawasan. Contohnya, bantuan telur untuk keluarga risiko *stunting*. Bantuan ini banyak dibagikan namun digunakan buat yang lain. Bahkan ada yang dijual ulang untuk dibelikan makanan instan.

Edwin Bara, S.Psi., MAP, Ketua Tim Kerja Pelatihan BKKBN Sulbar, yang hadir mewakili Kepala Perwakilan



Kegiatan Promosi dan KIE Percepatan Penurunan *Stunting* di Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Banggae Timur, Kabupaten Majene.



BKKBN Sulbar menyampaikan bahwa *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit berulang. Terutama sejak dalam kandungan hingga anak usia di bawah dua tahun atau di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

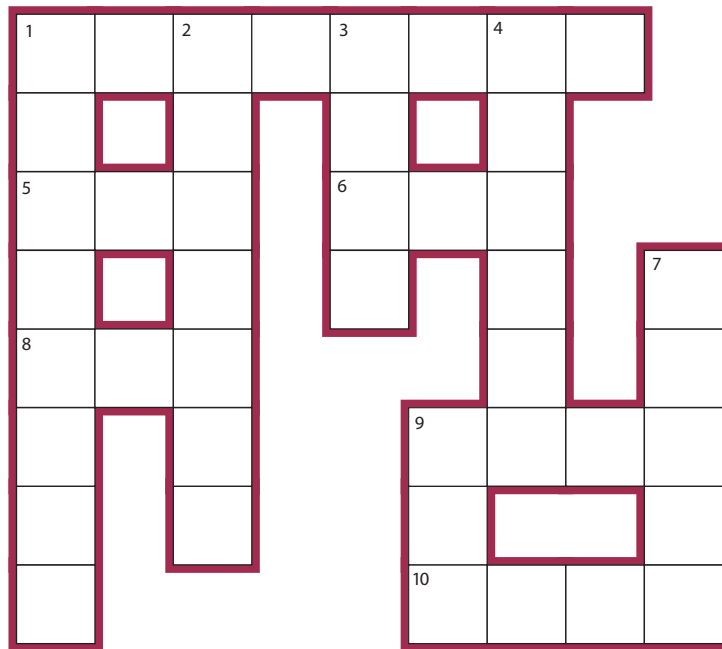
“Kekurangan gizi dapat terjadi karena pola asuh yang kurang tepat dalam pemberian makan balita, baik dari jumlah dan jenisnya serta lingkungan yang tidak bersih menyebabkan balita terpapar kuman dan bakteri,” kata Edwin.

Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Majene, Hj. Hasnawati, juga menyampaikan kepada masyarakat Majene agar kembali menerapkan pola hidup sehat, ibu memasak makanan bergizi di rumah, bapak mencari nafkah. “Jika ada remaja usia muda, tolong ditunda dulu nikahnya, karena berpotensi memunculkan *stunting* baru pada anak yang dilahirkan,” ujarnya.



Anggota Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal bersama Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Majene menyerahkan hadiah sepeda.

Editor: Santjojo Rahardjo



## TEKA-TEKI SILANG

TTS No.4/XI/23

### PERTANYAAN

#### Mendatar

1. Upaya menjaga kebersihan dan kesehatan
5. Unit Pelaksana Tugas
6. Pemberian Makanan Tambahan
8. Tentara Nasional Indonesia
9. *Age Spesific Fertility Rate*
10. Buang Air Besar Sembarangan

#### Menurun

1. Gangguan pertumbuhan akibat masalah gizi kronis dan kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang
2. Kandungan gizi atau zat yang diperoleh dari berbagai jenis bahan pangan
3. Tim Percepatan Penurunan *Stunting*
4. Satuan Tugas
7. Tidak gemuk
9. Angka Kematian Bayi

### JAWABAN

#### TTS NO.3/X/23

Mendatar:

1. RISKESDAS, 5. PMT, 6. SUSU, 7. MPASI, 9. AKS, 11. BKB

Menurun:

2. SATGAS, 3. ELSIMIL, 4. DASHAT, 5. PMBA, 8. IDI, 10. KEK

PEMENANG TTS HARAP MENGIRIMKAN DATA MELALUI EMAIL

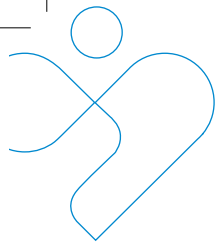
[mediacenterbkkbn@gmail.com](mailto:mediacenterbkkbn@gmail.com)

#### PEMENANG TTS NO.3/X/23

1. Siti Mardiyah
2. Yustika Agustina
3. Retno Suharno
4. Tasya Aisha
5. Amung Herdina



Menangkan voucher pulsa senilai Rp 100.000 untuk 5 pemenang. Jawab pertanyaan pada kolom TTS dengan benar dan kirimkan jawabannya melalui [mediacenterbkkbn@gmail.com](mailto:mediacenterbkkbn@gmail.com). Pemenang akan diundi dan diumumkan di Sahabat Keluarga edisi berikutnya.



# Sri Sultan HB X Berharap Penurunan *Stunting* di DIY Lampaui Target Nasional



Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan Rapor Hasil Evaluasi Triwulan 3 kepada para Bupati dan Walikota serta perwakilannya pada Rakordal Triwulan III Tahun 2023 di Bangsal Pracimosono, kompleks Kantor Gubernur DIY.

■ Penulis: FX Danarto SY

**YOGYAKARTA, BKKBN** – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap keberhasilan penurunan angka *stunting* di daerahnya bisa melampaui target 14 persen sehingga berkontribusi mendongkrak penurunan *stunting* secara nasional.

Hal itu disampaikan Gubernur DIY dalam arahan pada Rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) Triwulan III Tahun 2023 yang dilaksanakan Kamis (26/10/2023) di Bangsal Pracimosono, kompleks Kantor Gubernur.

Rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) dilaksanakan setiap triwulan untuk mengetahui progress dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dicapai setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

“Pada periode 2018 - 2022, prevalensi *stunting* (DIY) terus menurun dari 21,46 persen menjadi 16,4 persen. Untuk mencapai target 14 persen itu kita perlu mengupayakan berbagai program dan inovasi, serta mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak,” kata Gubernur.

Apalagi sesuai tema Rakordal kali ini, penurunan angka *stunting* diharapkan mampu berkontribusi secara

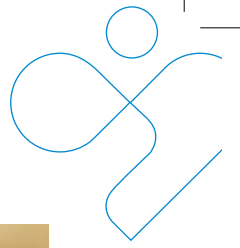
nasional atau mengangkat provinsi-provinsi lainnya yang capaiannya masih di bawah target nasional.

Sementara itu Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Tavip Agus Rayanto juga turut hadir dalam rakordal tersebut.

Sestama yang hadir mewakili Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan strategi yang harus ditempuh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bila ingin mengakselerasi percepatan penurunan *stunting*.

Tavip menunjukkan bahwa dari hasil pendataan keluarga diperoleh data jumlah baduta 55.885 dan balita 117.702 sehingga total sejumlah ada sejumlah 173.587 anak yang beresiko *stunting*. Jika berdasarkan SSGI prevalensinya *stunting*nya 16,4 persen maka sebetulnya jumlah yang harus digarap hanya sejumlah 28.400 anak saja. Bila dianggap sebarannya merata, maka jumlah yang harus diintervensi agar tidak *stunting* di setiap kapanewon (terdapat 78 kapanewon) rata-rata sebanyak 364 anak saja per kapanewon.

Beralih ke upaya pencegahan, dari hasil pengisian Elsimil oleh calon pengantin (catin) diketahui bahwa di DIY dari 15.500 jumlah catin hanya 10,8 persen saja yang mengisi Aplikasi Elsimil. Dari Catin yang mengisi Elsimil



Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Sri Sultan Hamengku Buwono X



Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN  
Tavip Agus Rayanto



Dr. dr. Andreasta Meliala

tersebut diketahui sebesar 5 persen berusia kurang dari 20 tahun, kurus/kurang berat badan 15 persen, dan 21.6 persen berstatus anemia.

Kondisi tersebut menjadi perhatian anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di tiap kelurahan untuk melaksanakan pendampingan dan memberikan rekomendasi.

Narasumber kedua, Dr. dr. Andreasta Meliala dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM menekankan pentingnya konvergensi penanganan *stunting*, baik secara *Cross Sectoral Collaboration* (kolaborasi lintas sektor) maupun *Cross Sector Leadership*. Andreasta menilai peran sektor swasta masih jauh dari optimal oleh karenanya perlunya

digalakkan kemitraan dengan pihak swasta.

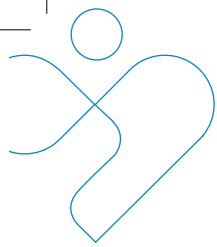
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Dra. Andi Ritamariani tampak hadir mendampingi dalam acara Rakordal ini Gubernur juga mengumumkan hasil evaluasi kinerja yang menempatkan Pengguna Anggaran (Eselon 2) dengan capaian nilai kinerja tertinggi adalah Inspektorat, dengan predikat Sangat Baik.

Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (Unit Eselon 3) dengan capaian nilai kinerja tertinggi adalah Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, dengan predikat Sangat Baik. Selain itu juga disampaikan Rapor Hasil Evaluasi Triwulan 3 kepada para Bupati dan Walikota yang hadir atau mewakilkan.

Editor: Kristianto



Rapat koordinasi pengendalian Triwulan III Tahun 2023 di Bangsal Pracimosono, kompleks Kantor Gubernur DIY.



# dr Hasto Menjawab

## • Kesehatan Reproduksi

### Hari Perkiraan Lahir

#### Pertanyaan:

Dok, saya sudah punya HPL (hari perkiraan lahir) ketika USG, contohnya tanggal 15 Juli. Kemudian HPL dari bidan 27 Juli. Tapi sampai sampai dengan 27 belum ada tanda-tanda mau melahirkan. Apakah saya perlu ke dokter?

Abya Kaliluna

#### Jawab:

Khusus para keluarga dan sahabat muda yang sedang hamil. Lamanya kehamilan itu 40 minggu, jadi 40 dikalikan 7 sama dengan 280 hari. Menghitung umur kehamilan yang paling baik adalah ketika baru telat seminggu hingga dua minggu. Jadi kalau Anda baru telat seminggu hingga dua minggu, terus datang



ke dokter dan dinyatakan positif hamil, nanti dokter akan menyatakan usia kehamilan sudah enam hingga tujuh minggu. Itu yang bisa dipercaya.

Tapi kalau Anda sudah hamil sekian bulan dan baru datang ke dokter, maka kemungkinan error hasil USG itu tinggi. Tingkat kesalahannya tinggi. Maka, untuk memastikan umur kehamilan yang paling baik adalah memeriksakan ke dokter atau bidan saat minggu pertama anda telat dan dinyatakan umur kehamilan Anda sudah lima, enam atau tujuh minggu. Artinya saat Anda telat satu hingga dua minggu adalah saat yang paling bagus untuk menentukan umur kehamilan.

Kalau sudah tanggalnya tapi belum lahir, yang paling penting adalah dicek paling telat seminggu sekali. Sebab kalau bayi sudah waktunya lahir namun belum juga lahir, maka plasenta itu akan menua. Kalau menua, plasenta sudah tidak bisa memproduksi air ketuban lagi, sehingga biasanya air ketubannya berkurang. Bukan karena bocor, tetapi karena sudah tidak diproduksi lagi sehingga air ketubannya habis.

Kalau air ketuban habis, kasihan bayinya. Terjepit di dalam ruang yang sempit yang tidak air untuk berenang. Sehingga Anda bisa merasakan saat usia kehamilan sembilan bulan, kalau air ketubannya berkurang, pergerakan bayi dalam kandungan juga berkurang.

Nah, ini yang bisa merasakan ibu-ibunya sendiri. Kalau yang air ketubannya normal, biasanya gerakan bayi banyak atau sering. Tapi kalau air ketubannya kurang, gerakan bayi hanya seperti bergeser, tidak ada tendangan. Nah, ini adalah tanda bahaya. Oleh karena itu, pesan saya jangan tenang-tenang kalau sudah lewat umur kehamilannya, segera cek ke dokter, lakukan USG dan cek ketuban dan juga kesehatan janinnya. ■

Redaksi menerima pertanyaan pembaca melalui email [mediacenter@bkkbn.go.id](mailto:mediacenter@bkkbn.go.id) atau melalui *Call Center* 0812 3888 8840, Media Center BKKBN

# Waktunya Segera Kita Jelang

■ Penulis: Satjojo Rahardjo

**T**ak lama lagi waktu itu akan kita jelang. Waktu di mana stunting menghadapi target 14 persen. Tepatnya di 2024 sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Waktunya kira-kira tinggal 10 bulan lagi.

Ada pesimistis digantung. Namun, bersamaan dengan itu, ada optimisme dikerek. Keduanya mewarnai perjalanan program percepatan penurunan *stunting* sejak 2021 yang akan segera memasuki 'garis finish'. Program ini berada di bawah payung Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk mencapai target 14 persen pada 2024, bangsa ini harus menurunkan kasus stunting 3,8 poin per tahun, sejak 2022. Bukan hal mudah. Sejauh ini belum ada capaian sebesar itu, sekalipun sejak data 2007. Pun capaian 2021 ke 2022. Maka, kegamangan pun menghinggapi sekelompok masyarakat. Mustahil angka tersebut dicapai. Walau berbagai intervensi dilakukan. Mungkin butuh hitungan generasi untuk merubah pemahaman masyarakat tentang bahaya dan ancaman *stunting* bagi masa depan bangsa ini.

Adalah benar yang dikemukakan Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K). "Butuh upaya maksimal untuk mengejar target prevalensi *stunting* 14 persen." Memang, sekali lagi, tidak mudah mengejar target di sisa waktu 10 bulan ini. Lagi pula pada Agustus 2024, Tim Survei sudah mulai mendata prevalensi *stunting*.

Dari sisi lain, kalangan yang optimis menilai target 14 persen akan terealisasi. Kuncinya, semua pihak harus ekstra keras bekerja dan mampu menelurkan inovasi atau program terobosan dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Apalagi data empiris yang dimiliki BKKBN menunjukkan prevalensi *stunting* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Sebagai bukti, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) memperlihatkan pada 2007 angka prevalensi *stunting* berada di posisi 36,8 persen.

Masih mengutip Riskesdas, prevalensi *stunting* sempat naik pada 2013 menjadi 37,2 persen. Namun sejak 2018 trennya menurun menjadi 30,8 persen (2018). Tahun 2019 dilanjutkan oleh hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) juga menurun 27,7 persen, 24,4 persen (2021), dan 21,6 persen (2022).

Penurunan prevalensi *stunting* berdasarkan fakta di atas jelas menjadi penyemangat bagi banyak sektor dan pihak, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah bersama mitra *pentehelix* secara gotong royong selama ini telah berbuah manis. Ke depan diyakini bisa lebih diturunkan. Apalagi dikerjakan beramai-ramai. Kalaupun BKKBN memasang target di 2023 prevalensi *stunting* turun 3,8 poin jadi 17,8 persen, itu juga dinilai bukan mustahil dicapai.

Bersama angka-angka itu dan komitmen banyak pihak, termasuk para kepala daerah, BKKBN optimistis target prevalensi *stunting* 14 persen pada 2024 dapat direalisasikan. Memang, tidak mudah menurunkannya manakala berkaca ada 71 juta entitas keluarga di seluruh Indonesia (Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022). Ironisnya, dari jumlah itu masih tersisa 13,5 juta keluarga berisiko *stunting*.

Beratnya pemerintah menurunkan prevalensi *stunting* diakui juga oleh Roslina Verauli, M.PSI., Psi, psikolog Klinis



Roslina Verauli M. PSI, Psi

Anak, Remaja dan Keluarga. Ia mendasari pendapatnya itu lebih pada pola pengasuhan. Pola pengasuhan yang sebagian besar masih dibebankan kepada istri. Artinya, dukungan kepada istri dalam menjalankan fungsinya sebagian besar terabaikan oleh suami. "Ada banyak istri tidak mendapat dukungan. Suami tidak terlalu hadir dan berperan. Ketika suami istri menikah, semua diserahkan ke istri. Peran suami yang tidak hadir sejak awal pernikahan menyebabkan istri stres, lalu mengalami 'baby blues'. Kemudian berkembang menjadi depresi setelah melahirkan," ungkap Roslina.

Kondisi itu menyebabkan secara emosional mereka (istri) 'disfunction'. Artinya, tidak mampu berfungsi atau menjalankan peran-perannya dengan baik. "Bagaimana ibu-ibu ini

mampu memberikan ASI kepada anak-anaknya dengan baik kalau dia stres," Roslina berujar.

Meminjam istilah Roslina, istri-istri seperti ini sebenarnya kurang sehat mental atau istri yang tidak sejahtera mentalnya. Dampaknya anak-anak terabaikan, oleh ibu-ibu yang tidak mampu menjalannya fungsinya, oleh ayah-ayah yang tidak hadir.

Dalam kondisi begitu, pertanyaannya apakah mereka memiliki kemampuan memberikan nutrisi dan gizi pada anak. Apakah mereka memiliki keterampilan memantau tumbuh kembang anak. Apakah mereka mampu menjalankan fungsi pengasuhan kepada anak dengan baik. Kompleksitas persoalan ini berpotensi memunculkan bayi-bayi yang dilahirkan dalam kondisi *stunting*. Bukan hanya berasal dari keluarga miskin semata, tetapi menurut data justru 70 persen bayi *stunting* terjadi pada keluarga berkemampuan secara finansial.

Masih mengutip penilaian Roslina, *stunting* adalah sebuah sistem yang kompleks. Jauh lebih kompleks ketimbang sistem di organisasi atau perusahaan. Ada banyak pihak berperan di dalamnya. Jadi, harus dari mana memulainya? "Kita semua harus bertanggungjawab," kata Roslina menjawab diplomatis.

Persoalan optimis-pesimis apakah target 14 persen dapat diraih, mengambil penilaian psikolog Roslina, lebih berpulang pada kesadaran bersama semua elemen masyarakat, apakah *stunting* merupakan isu keluarga, isu masyarakat atau isu kita bersama. "Maka, saatnya kita dukung ibu-ibu untuk mampu memberikan pengasuhan yang tepat buat anak, didukung para ayah," urai Roslina.

Agaknya usulan tentang "Hari Ayah Nasional" oleh segelintir pihak perlu mendapat apresiasi dan dipertimbangkan kembali untuk diadakan. Setidaknya, menurut Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Dr. Sudibyo Alimoeso, M.A peringatan Hari Ayah Nasional bisa menjadi momentum atau pengingat bahwa ayah juga mempunyai peranan penting dalam keluarga dalam kerangka pola asuh anak.

Dalam program percepatan penurunan *stunting*, kehadiran Tim Pendamping Keluarga (TPK) tampak sekali semakin menyempurnakan upaya merealisasikan target 14 persen itu. "Peran pendamping penting, yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan perubahan perilaku. Namun, pendekatannya harus disesuaikan dengan profil ayah ibu muda di masa sekarang."

Apa yang dikemukakan Roslina di atas seolah mengabarkan bahwa optimisme 14 persen bakal terealisasi di 2024, asal dikerjakan secara bersama-sama. ■



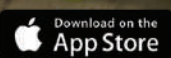
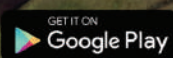
# JURUS CATIN

**PERIKSA KESEHATAN 3 BULAN SEBELUM NIKAH**



Sahabat Keluarga  
Edisi November 2023

SEMUA CATIN (CALON PENGANTIN) HARUS MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TERDEKAT (PEMERINTAH ATAU SWASTA) YANG MENCAKUP PEMERIKSAAN HB DARAH, PENGUKURAN BERAT BADAN, TINGGI BADAN DAN LINGKAR LENGAN ATAS (KIRI DAN KANAN). JIKA DITEMUKAN POTENSI ANEMIA PADA CATIN PEREMPUAN PERLU WAKTU 3 BULAN UNTUK MEMPERBAIKI KONDISI TERSEBUT. HASIL PEMERIKSAAN NANTINYA AKAN DI-INPUT DI APLIKASI ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH DAN HAMIL). DOWNLOAD SEGERA APLIKASI ELSIMIL LALU IKUTI LANGKAH DAN PETUNJUKNYA.



#BerencanaItuKeren

@BKKBNofficial